

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis



Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, secara geografis luas wilayah Provinsi Banten adalah 8.651,20 km², yang terletak di ujung barat Pulau Jawa dan berjarak sekitar 90 km dari DKI Jakarta yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan 2 (dua) kota yaitu Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008, Provinsi Banten memiliki luas sebesar 9.662,92 km² atau sekitar 0,51% dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, tahun 2008 telah terjadi pemekaran wilayah dengan terbentuknya Kota Serang sebagai pemekaran dari Kabupaten Serang dan Kota Tangerang Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Saat ini jumlah kabupaten/kota di Provinsi Banten menjadi 4 (empat) kabupaten dan 4 (empat) kota dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Laut Jawa
2. Sebelah Timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.
3. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia
4. Sebelah Barat dengan Selat Sunda

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2012 jumlah penduduk Provinsi Banten mencapai 11.248.947 jiwa yang terdiri dari 5.741.942 orang laki-laki dan 5.507.005 orang perempuan. Laju pertumbuhan rata-rata penduduk Banten pada tahun 2012 sebesar 2,16%.

Ekosistem wilayah Provinsi Banten secara umum terdiri dari kawasan hutan pegunungan di sebelah selatan dan kawasan pantai sebelah utara melingkar menuju selat sunda di sebelah barat.

Potensi sumber daya air wilayah Provinsi Banten banyak ditemui di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Hal itu disebabkan sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai (WS), di Provinsi Banten terbagi kedalam 4 (empat) wilayah sungai, yaitu :

1. WS. Ciliwung – Cisadane;
2. WS. Cidanau – Ciujung – Cidurian;
3. WS. Ciliman – Cibungur;
4. WS. Cibaliung – Cisawarna.

Iklim wilayah Banten dipengaruhi oleh angin munson dan gelombang la nina. Cuaca didominasi oleh angin barat dari samudera hindia dan angin asia di musim penghujan serta angin timur pada musim kemarau. Suhu udara di Banten berkisar antara 22,1⁰C-33,7⁰C, dengan kelembaban udara bervariasi antara 76% - 865%. Jumlah hari dan curah hujan dalam setahun masing-masing sebanyak 165 hari dan 1.141 mm.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kinerja pembangunan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi secara umum bisa dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penurunan angka kemiskinan dan lain sebagainya.

LPE merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Perkembangan LPE di Provinsi Banten dapat dilihat pada **Tabel 2.1** berikut :

Tabel 2.1
Perkembangan LPE Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten
Tahun 2009 - 2013 (%)

NO	KABUPATEN/KOTA	2009	2010	2011	2012	2013
Kabupaten						
1	Pandeglang	5,43	7,16	5,40	5,62	-
2	Lebak	5,18	6,59	6,44	5,01	-
3	Tangerang	4,41	6,71	7,35	6,22	-
4	Serang	3,18	4,15	5,67	5,10	-
Kota						
5	Tangerang	5,74	6,68	7,03	6,41	-
6	Cilegon	5,08	5,32	6,53	6,82	-
7	Serang	5,74	7,69	7,87	7,06	-
8	Tangerang Selatan	8,49	8,70	8,84	8,24	-
Provinsi Banten		4,71	6,11	6,39	6,38	5,66

Sumber : BPS Banten Dalam Angka 2013

LPE tidak akan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat bila diimbangi juga dengan tingginya laju inflasi. Inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa. Perkembangan laju inflasi menurut kelompok pengeluaran di Provinsi Banten dapat dilihat pada **Tabel 2.2** berikut :

Tabel 2.2
Perkembangan Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
di Provinsi Banten Tahun 2009 - 2013 (%)

NO	KELOMPOK PENGELUARAN	2009	2010	2011	2012	2013
1	Bahan makanan	1,81	14,10	4,76	3,88	12,64
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	8,33	3,76	2,95	8,24	9,73
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	3,17	4,41	3,16	2,39	6,14
4	Sandang	7,16	8,37	7,02	3,93	1,12
5	Kesehatan	6,76	5,30	4,03	4,97	5,53
6	Pendidikan, rekreasi, dan olahraga	6,13	3,64	6,44	9,11	7,59
7	Transportasi, komunikasi dan jasa keuangan	-4,27	1,10	0,02	1,79	17,31
Provinsi Banten		2,86	6,10	3,45	4,37	9,93

Sumber : BPS Banten Dalam Angka 2013

PDRB adalah jumlah nilai tambah seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi disuatu daerah pada periode tertentu. Perkembangan PDRB salah satunya dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor ekonomi di Provinsi Banten dapat dilihat pada **Tabel 2.3** berikut:

Tabel 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Ekonomi
di Provinsi Banten Tahun 2011 - 2013

NO	SEKTOR	2011		2012		TW III 2013	
		MILYAR RP	%	MILYAR RP	%	MILYAR RP	%
1	Pertanian	15.285,43	7,95	16.762,48	7,88	5.235,56	8,28
2	Pertambangan dan Penggalian	201,03	0,10	223,22	0,10	62,57	0,10
3	Industri Pengolahan	91.675,15	47,69	97.799,41	45,95	38.805,22	45,57
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	6.822,95	3,55	7.830,03	3,68	2.267,32	3,59
5	Konstruksi	6.843,31	3,56	7.854,53	3,69	2.213,42	3,50
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	35.563,25	18,50	40.957,99	19,24	12.410,49	19,63
7	Pengangkutan & Komunikasi	17.638,07	9,18	20.150,70	9,47	5.967,12	9,44
8	Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	7.361,39	3,83	8.301,12	3,90	2.433,47	3,85
9	Jasa-jasa	10.836,87	5,64	12.977,12	6,10	3.814,83	6,04
PDRB		192.227,49	100,00	212.856,62	100,00	63.210,00	100,00

Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2012 dan BRS BPS Provinsi Banten No. 52/11/36/Th.VII, 6 November 2013, dan BI (Kajian Regional Provinsi Banten triwulan III Tahun 2013)

2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan daerah dengan fokus kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan masyarakat yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal intelektualitas, kelangsungan hidup, dan standar hidup layak. Perkembangan IPM di Provinsi Banten dapat dilihat pada **Tabel 2.4** berikut :

Tabel 2.4
Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2009 - 2012

NO	KABUPATEN/KOTA	2009	2010	2011	2012
Kabupaten					
1	Pandeglang	67,99	68,29	68,77	69,22
2	Lebak	67,45	67,67	67,98	68,43
3	Tangerang	71,45	71,76	72,05	72,36
4	Serang	68,27	68,67	69,33	69,83
Kota					
5	Tangerang	74,89	75,17	75,44	75,72
6	Cilegon	74,99	75,29	75,60	75,89
7	Serang	69,99	70,61	71,45	72,30
8	Tangerang Selatan	75,01	75,38	76,01	76,61
Provinsi Banten		70,06	70,48	70,95	71,49

Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2013

IPM disusun dari tiga komponen yaitu tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS) pada penduduk dewasa, lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir (AHH), serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran daya beli masyarakat.

AMH menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (latin dan huruf lainnya). AMH mengalami peningkatan yaitu dari 95,95% pada tahun 2009 menjadi 96,20% pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi 96,25%, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 96,51%. RLS menggambarkan lamanya penduduk usia sekolah yang bersekolah (dalam tahun), mencapai 8,15 pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 mencapai 8,32 dan nilai RLS pada tahun 2011 mencapai 8,41 sedangkan pada tahun 2012 sebesar 8,61.

AHH di Provinsi Banten pada tahun 2010 adalah sebesar 64,90 meningkat menjadi 65,05 pada tahun 2011 dan meningkat lagi pada 2012 menjadi 65,23. Peningkatan AHH tersebut merupakan gambaran kinerja pembangunan kesehatan yang meningkat.

Daya beli masyarakat Provinsi Banten pada tahun 2012 mencapai angka sebesar Rp. 636,73 (dalam ribu rupiah ppp), angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2011 yang sebesar Rp. 633,64 (dalam ribu rupiah ppp). Daya beli sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendapatan dan inflasi (tingginya harga barang dan jasa).

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan pemerintahan daerah.

Fokus layanan urusan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan umum diarahkan pada :

1. Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah pendidikan dasar, yaitu dari 97,56% pada tahun 2008 menjadi 97,85% pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 naik

menjadi 98,01%, dan pada tahun 2011 naik menjadi 98,23% sedangkan pada tahun 2012 mencapai 98,29%.

Pelayanan pendidikan juga dapat dilihat dari ketersediaan sekolah dan guru. Pada tahun 2012, rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk pendidikan dasar adalah 43,35; SLTP 29,30 dan SLTA 501,80. Sedangkan rasio guru dengan murid 457 untuk tingkat SD, SLTP 629 dan SLTA 507.

Pada tahun 2012 jumlah guru SD/MI 77.842 orang, SMP/MTS 82.050 orang, SMA/MA 24986 orang, dan SMK 10.973 orang. Untuk total ketersediaan guru 138.545 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan sekolah dan guru, serta proses belajar mengajar pada ketiga jenjang pendidikan tersebut sudah ideal.

Pada sisi lain berdasarkan total jumlah ketersediaan guru tersebut sudah sesuai kualifikasi 76.549 (55,25%) dan belum sesuai kualifikasi 61.996 orang (44,75%). Hal ini menunjukkan masih diperlukan upaya peningkatan kualitas guru melalui peningkatan kualifikasi dan sertifikasi.

2. Kesehatan

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak hal dan diantaranya adalah faktor layanan kesehatan. Efektifitas faktor layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain:

- 1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan;
- 2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidan dan apoteker;
- 3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.

Pada tahun 2011, jumlah rumah sakit di Provinsi Banten sebanyak 69 unit, Puskesmas sebanyak 222 unit, sedangkan pada tahun 2012 jumlah rumah sakit di Provinsi Banten sebanyak 72 unit, dan jumlah Puskesmas 228 unit. Pemberi layanan kesehatan pada tahun 2012, terdiri dari dokter sebanyak 3.949 orang (dokter umum 1.552 orang,

dokter ahli 1.805 orang, dokter gigi 592 orang), bidan 4.392 orang, perawat 11.233 orang dan tenaga paramedis non keperawatan sebanyak 1.748 orang.

Pemerataan tenaga layanan kesehatan sangat penting dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Banten, karena pemerataan distribusi akan berdampak langsung pada kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat perdesaan yang umumnya tergolong dalam masyarakat miskin. Upaya layanan kesehatan terhadap masyarakat miskin, secara berkelanjutan terus dilakukan. Namun masih saja menghadapi masalah seperti keterbatasan akses layanan kesehatan dan rendahnya status kesehatan yang berdampak pada rendahnya daya tahan tubuh untuk bekerja dan mencari nafkah, terbatasnya kemampuan anak dan keluarga untuk tumbuh dan berkembang serta secara tidak langsung berpengaruh terhadap rendahnya derajat kesehatan ibu.

3. Perhubungan

Secara geografis, Provinsi Banten terletak pada jalur penghubung darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga ketersediaan jalan menjadi faktor yang sangat strategis. Pada tahun 2012 Provinsi Banten telah terlayani oleh ketersediaan jaringan jalan (jalan nasional dan jalan provinsi) sepanjang 1.329,38 Km. Total panjang jalan nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/Kpts/M/2009 adalah 476,49 Km dan total panjang jalan provinsi berdasarkan SK Gubernur Banten Nomor 761/Kep.1039-Huk/2011 Tanggal 8 Desember 2011 adalah 852,89 Km.

Tercatat jumlah mobil penumpang, barang, dan bus pada tahun 2012 yaitu kendaraan umum 46.557 unit, kendaraan dinas (pemerintah) 23.637 unit, dan kendaraan bukan umum sebanyak 3.430.713 unit. Sedangkan pada tahun 2011 tercatat jumlah kendaraan umum 45.729 unit, kendaraan dinas (pemerintah) 19.415 unit, dan kendaraan bukan umum sebanyak 3.136.350 unit.

Di Banten, terdapat 21 stasiun kereta api yang menghubungkan Merak dengan tanah abang dan jakarta kota. Jumlah penumpang dan barang yang diangkut oleh angkutan kereta api pada tahun 2012 mencapai 4.420.608 orang, lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya 4.490.634 orang. Sedangkan untuk jumlah

barang yang diangkut oleh kereta api mengalami peningkatan dari 313.804 ton barang pada tahun 2011 menjadi 497.664 ton barang pada tahun 2012. Ketersediaan terminal Tipe A sebanyak 3 unit, Tipe B sebanyak 6 unit, dan terminal tipe C 10 unit. Selain itu terdapat juga 3 UPT pemeriksaan dan penimbangan kendaraan bermotor.

Matra yang paling banyak digunakan dalam menunjang transportasi dari dan ke Provinsi Banten yang menjadi penghubung antar daerah di Provinsi Banten adalah transportasi darat karena merupakan matra yang paling mudah dan dapat digunakan oleh semua kalangan dengan berbagai keperluan dan kebutuhan. Oleh karena itu tingkat pelayanan prasarana jalan menjadi sangat vital kedudukannya karena menjadi salah satu barometer yang menentukan keberhasilan pertumbuhan dan pembangunan di Provinsi Banten. Untuk melayani pergerakan barang dan penumpang secara umum sistem jaringan jalan Provinsi Banten menggunakan pola cincin yang melingkar dari wilayah Utara sampai ke wilayah Selatan yang dihubungkan secara radial dengan jaringan jalan vertikal Utara-Selatan dan secara horizontal Timur-Barat. Konsep jaringan “*ring-radial*” dimaksudkan agar pergerakan penumpang dan barang dari pesisir menuju ke pusat kegiatan nasional, wilayah maupun lokal yang ada pada bagian tengah wilayah dapat dicapai dengan mudah. Pada saat ini jaringan jalan cincin bagian Barat dan Selatan sudah ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional. Sementara pada bagian utara masih berstatus sebagai jalan provinsi. Jalan horizontal timur-barat dilayani oleh jalan nasional serta jalan tol jakarta-merak dengan panjang lebih dari 90 Km, sedangkan jalan vertikal utara-selatan dilayani dengan jalan provinsi. Jalan kabupaten/kota melayani akses ketiga jalan itu.

Banten memiliki 4 (empat) bandara udara yaitu Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Udara Budiarto Curug, Bandara Udara Pondok Cabe dan Lapangan Terbang Gorda. Bandara Soekarno-Hatta adalah bandar udara terbesar di Indonesia dan menjadi pintu utama keluar-masuk internasional bagi Indonesia. Pada tahun 2012, penerbangan dan penumpang domestik adalah sebanyak 154.165 kedatangan pesawat, 151.741 keberangkatan pesawat dan 40.974.141 penumpang yang datang dan 19.793.308 penumpang yang berangkat. Sedangkan, banyaknya penerbangan dan penumpang

internasional masing-masing sebanyak 37.729 kedatangan pesawat, 37.477 keberangkatan pesawat dan 5.920.100 penumpang yang datang dan 5.903.868 penumpang yang berangkat.

Pada tahun 2011, jumlah trip angkutan penyeberangan di pelabuhan Merak sebanyak 29.875 trip, meningkat bila dibandingkan tahun 2010 sebanyak 27.111 trip. Meskipun demikian, volume penumpang yang diangkut mengalami penurunan, bila pada tahun 2010 jumlah penumpang mencapai 1.347.335 orang, pada tahun 2011 jumlah penumpang hanya mencapai 1.322.112 orang. Sedangkan untuk unit kendaraan jumlahnya terus meningkat, pada tahun 2010 total kendaraan yang menyeberang mencapai 1.773.672 unit kendaraan, dan pada tahun 2011 mencapai 1.964.725 unit kendaraan.

4. Perumahan

Persentase kepemilikan perumahan di Provinsi Banten mengalami kenaikan dari 72,33% pada tahun 2010 menjadi 75,96% di tahun 2011 dan meningkat menjadi 76,98% pada tahun 2012. Sebaliknya, persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan status sewa/kontrak pada tahun 2010 sebesar 17,68% dan pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 14,88%, dan berkurang menjadi 13,94% pada tahun 2012. Untuk status lainnya juga mengalami penurunan dari 9,99% pada tahun 2010 menjadi 9,16% pada tahun 2011 dan semakin berkurang pada tahun 2012 menjadi sebesar 9,08%. Sementara itu, kondisi fisik rumah yang ditempati terlihat sedikit mengalami peningkatan. Tercatat persentase rumahtangga di Banten pada tahun 2012 yang menempati rumah dengan lantai bukan tanah 95,03%, berdinding tembok sebesar 82,76% dan beratap genteng sebesar 82,63%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011 untuk lantai bukan tanah sebesar 94,27%, berdinding tembok sebesar 81,50% dan beratap genteng sebesar 86,04%.

Akses terhadap air minum bersih sepertinya masih menjadi masalah yang cukup serius bagi penduduk Banten. Meskipun persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2011 hampir separuh dari total rumahtangga di Banten belum mempunyai akses terhadap sumber air minum bersih. Adapun persentase sumber utama air bersih pada tahun 2011 adalah air dalam kemasan 40,84%, air ledeng 5,13%, air

pompa 25,11%, air sumur 21,97% dan sumber utama air minum lainnya sebesar 6,95%. Sedangkan pada tahun 2012 untuk air dalam kemasan 42,72%, air ledeng 4,94%, air pompa 26,74%, air sumur 18,52% dan sumber utama air minum lainnya sebesar 7,08%.

5. Lingkungan Hidup

Luas kawasan hutan saat ini tercatat 208.161,27 ha atau 24,06% terhadap luas provinsi di Banten, namun demikian hasil pencitraan satelit luas vegetasi tutupan lahan masih 29,3%, padahal amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang luas tutupan lahan seharusnya 30% dari luas wilayah. Lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya atau lahan kritis di Banten mencapai 104.103,01 ha atau 12% dari luas wilayah, mengalami penurunan sebesar 11,71% dari luas lahan kritis sebelumnya yaitu 117.913,29 Ha. Penurunan luas lahan kritis tersebut disebabkan oleh keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

6. Komunikasi dan Informatika

Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah, dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Khusus untuk layanan jasa telepon kabel, beberapa daerah perkotaan pada tahun 2010 angka *teledensitasnya* sudah tinggi (>10), sedangkan untuk daerah kabupaten kondisi teledensitasnya masih rendah, terutama untuk jaringan telekomunikasi perdesaan. Lambatnya pertumbuhan pembangunan sambungan tetap tersebut salah satunya disebabkan oleh bergesernya fokus bisnis penyelenggara kepada pengembangan telekomunikasi bergerak (selular). Untuk pengembangan jaringan telekomunikasi perdesaan saat ini telah dilakukan berbagai upaya salah satunya melalui program Kemampuan Pelayanan Universal (KPU)/Universal Service Obligation (USO) yang digagas oleh pemerintah pusat sebanyak 40 USO.

Cakupan layanan komunikasi dan informatika untuk surat kabar telah menjangkau hingga ke pelosok wilayah. Berdasarkan data Perhubungan, Komunikasi dan informatika dalam angka tahun 2010, terdapat operator seluler 7 operator, surat kabar nasional

yang ada berjumlah 39, sedangkan jumlah surat kabar lokal sebanyak 6 surat kabar. Pada tahun 2012 penyiaran radio dan TV yang telah memiliki perizinan di Provinsi Banten adalah sebanyak 51 buah stasiun radio dan 11 lembaga penyiaran TV.

7. Penataan Ruang

Arahan penataan ruang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekjur yang berkaitan dengan kebijakan penataan ruang melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten tahun 2010-2030 adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan sistem pusat permukiman di Kawasan Jabodetabekjur untuk mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta, dengan kota inti adalah Jakarta dan kota satelit adalah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota lainnya;
- 2) Pengembangan jalan lingkar luar kedua (JORR 2) dan jalan radialnya sebagai pembentuk struktur ruang Jabodetabekjur dan untuk memberikan pelayanan pengembangan sub pusat perkotaan seperti Serpong/Kota Mandiri Bumi Serpong Damai, Cinere, Cimanggis, Cileungsi, Setu, dan Tambun/Cikarang;
- 3) Peningkatan pemanfaatan jaringan jalur kereta api pada ruas-ruas tertentu sebagai prasarana pergerakan komuter dari wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebaliknya;
- 4) Pengembangan jalan yang menghubungkan antar wilayah dan antar pusat-pusat permukiman, industri, pertanian, perdagangan, jasa dan simpul-simpul transportasi serta pengembangan jalan penghubung antara jalan non-tol dan jalan bebas hambatan;
- 5) Pengembangan sistem jaringan transportasi masal yang menghubungkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pusat-pusat di sekitarnya;
- 6) Arahan pengembangan prasarana drainase dan pengendalian banjir di Kawasan Jabodetabekjur dilakukan melalui upaya :
 - a. Rehabilitasi hutan dan lahan serta penghijauan kawasan tangkapan air;
 - b. Penataan kawasan sungai dan anak-anak sungainya;

- c. Normalisasi sungai-sungai dan anak-anak sungainya;
 - d. Pengembangan waduk-waduk pengendali banjir dan pelestarian situ-situ serta daerah retensi air;
 - e. Pembangunan prasarana dan pengendali banjir; dan
 - f. Pembangunan prasarana drainase.
- 7) Sistem pengelolaan persampahan di Kawasan Jabodetabekjur diarahkan dikembangkan secara terpadu melalui kerjasama antar daerah dengan mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha. Penentuan lokasi tempat pembuangan akhir di Kawasan Jabodetabekjur harus memperhatikan daya tampung dan volume sampah domestik dan non domestik dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur, serta berada pada jarak aman yang tidak mencemari lingkungan di sekitarnya.
- 8) Zona Penyangga dalam kawasan budidaya mempunyai potensi untuk reklamasi yang penyelenggaraannya dilakukan secara bertahap dengan koefisien zona terbangun antara 40%-45% dengan jarak dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter dan harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan.

Cakupan pelayanan umum penataan ruang secara detail disusun dan dilaksanakan oleh kabupaten/kota, sedangkan provinsi memberikan arahnya. Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) di daerah perkotaan adalah sebesar 30% yang terdiri dari: (1) 20% RTH Publik, dimana pemerintah yang harus mengadakan baik pembebasan lahannya maupun komponen penunjangnya, dan (2) 10% dilaksanakan oleh private yaitu lahan RTH yang ada di kawasan pemukiman atau lahan pekarangan rumah. Pemerintah daerah juga diarahkan untuk mempunyai inisiasi membuat RTH di pemukiman padat dengan perhitungan tertentu, karena selain berfungsi sebagai paru-paru kota dan bersosialisasi, juga untuk evakuasi bencana.

8. Pemerintahan

Provinsi Banten secara administratif terdiri dari 4 (empat) kabupaten yaitu Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang, serta 4 (empat) kota yaitu Tangerang, Cilegon, Serang dan Tangerang

Selatan. Adapun jumlah kecamatan di seluruh Banten sebanyak 155, sedangkan jumlah desa dan Kelurahan menjadi 1.551 (Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 146.2/2006/PMD tanggal 22 Maret 2012).

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten selama periode tahun 2011-2012 tidak terlalu banyak mengalami peningkatan, yaitu dari 3.868 orang menjadi 3.825 orang. Pada tahun 2011 proporsi PNS laki-laki sebanyak 2.493 orang dan perempuan sebanyak 1.397, sedangkan tahun 2012 jumlah laki-laki sebanyak 2.444 orang dan perempuan sebanyak 1.381 orang.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel diperlukan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten yang bersinergi dengan pemerintah, pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melayani masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2012 telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 3 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten pada tanggal 8 Agustus 2012 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

9. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Banten cenderung fluktuatif. Pada Agustus 2012 TPAK mencapai 5.125.057 orang (65,03%). Jumlah ini mengalami peningkatan pada Februari 2013 menjadi 5.475.876 (68,62%). Pada tahun 2012, Pandeglang memiliki TPAK tertinggi 571.074 (69,02%) sedangkan Kabupaten Lebak memiliki TPAK terendah (63,16%). Dilihat dari Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Provinsi Banten hanya sebesar 85,87%, padahal di provinsi lainnya minimal 88,68%. Meskipun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terlihat semakin menurun, dari 13,06% di tahun 2011 menjadi 10,74% pada 2012 dan kembali menurun menjadi 9,9% pada tahun 2013.

Upah minimum, memiliki peranan penting dalam masalah tenaga kerja. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan UMK yang sangat besar khususnya untuk daerah industri, seperti di Kota Serang dari Rp 1.320.500 pada tahun 2012 menjadi Rp 2.080.000 pada tahun 2013.

Secara rata-rata UMK di Provinsi Banten mengalami peningkatan dari Rp 1.040.000 pada tahun 2012 menjadi 1.170.000 pada tahun 2013.

Bila diperhatikan menurut komposisi lapangan pekerjaan utama, sektor industri pengolahan mendominasi jumlah penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 25,84%, sedangkan pada sektor perdagangan, rumah makan dan hotel sebesar 24,36% disusul kemudian oleh sektor jasa-jasa 18,88%, sektor lainnya 17,83% dan sektor pertanian sebesar 13,09%.

10. Pertanian

Produksi padi di Provinsi Banten mencapai 1.865.894 ton di tahun 2012 dengan produktivitas sebesar 51,45 kw/ha dan luas panen sebesar 362.636 ha. Bila dibandingkan dengan produksi padi di tahun 2011 produksi padi di tahun 2012 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2011 produksi padi sebesar 1.949.714 ton, meskipun belum mencapai tingkat produksi 2010 yang mencapai 2.048.047 ton dengan produktivitas sebesar 49,11 kw/ha. Sementara itu untuk komoditas palawija, pada periode tahun 2010-2013 produksinya menurun, yaitu dari 221.517 ton menjadi 143.307 ton.

Selain padi, Provinsi Banten juga memiliki komoditas tanaman unggulan lain, diantaranya adalah tanaman anggrek dengan tingkat produksi yang tertinggi di Indonesia. Sentra produksi tanaman tersebut terdapat di Kota Tangerang Selatan dan menjadi salah satu obyek wisata di Banten. Emping melinjo yang sudah diekspor hingga ke Timur Tengah, dengan sentra produksi terdapat di Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon. Gula aren yang dapat digunakan sebagai panganan dengan sentra produksi di Kabupaten Lebak, buah melon dengan kualitas ekspor yang terkonsentrasi di Kota Cilegon, dan buah durian asal Kabupaten Pandeglang dan Serang memiliki rasa yang khas.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2012, mengoptimalkan peran peternakan berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan karena kondisi dan potensi yang dimiliki oleh peternakan masyarakat di Provinsi Banten sangat besar dalam pencapaian PSDSK. Selain itu, melalui optimasi peran serta peternakan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan peternak itu

sendiri. Melalui APBD dan APBN TA. 2012, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Banten telah memfasilitasi dan menstimulasi kegiatan peternakan masyarakat dalam meningkatkan produksi peternakan di Provinsi Banten di tahun 2012.

Dapat diketahui bahwa produksi daging di Provinsi Banten di tahun 2012 mencapai 175.922.416 Kg dari target produksi sebesar 182.242.133 Kg. Jumlah ini mengalami kenaikan nyata dibandingkan dengan produksi daging di tahun 2010 yang hanya mencapai 136.502.264 Kg dari target sebesar 136.502.264 Kg dan di tahun 2011 mencapai 170.195.129 Kg dari target produksi sebesar 167.214.193 Kg. Belum tercapainya target produksi di tahun 2012 dapat disebabkan oleh beberapa hal yang saling berkaitan, diantaranya jumlah hewan ternak yang masuk ke Rumah Pemotongan Hewan/ Unggas (RPH/U), permintaan pasar akan produk daging sebagian komoditi hewan ternak, semakin tingginya harga produk daging dan adanya peralihan konsumsi masyarakat terhadap daging ke telur sebagai produk substitusi yang dapat memenuhi kebutuhan protein hewani.

Perkembangan produksi telur di Provinsi Banten di tahun 2012 telah mencapai sebesar 89.788.664 Kg dari target produksi sebesar 84.868.672 Kg meningkat dibandingkan dengan produksi di tahun 2010 yang hanya mencapai 56.809.969 Kg dengan target produksi 56.809.969 Kg dan tahun 2011 sebesar 82.849.803 Kg melampaui target produksi sebesar 82.838.088 Kg.

11. Kelautan dan Perikanan

Kinerja produksi perikanan di Banten pada tahun 2012 mencapai 74,51% (target 210.033,30 ton realisasi 156.489 ton). Produksi perikanan dibagi dua yaitu produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap di Banten mencapai 95,50% (target 66.427 ton realisasi 60.811 ton), dengan produksi tertinggi di Kabupaten Pandeglang sebanyak 24.093 ton. Untuk produksi budidaya di Banten mencapai 64,80% (target 143.606,30 ton realisasi 87.134 ton), dengan produksi tertinggi di Kabupaten Serang sebanyak 53.724 ton.

Provinsi Banten memiliki empat komoditas unggulan dalam kegiatan perikanan budidaya, yaitu rumput laut, kerang hijau, bandeng dan udang. Produksi rumput laut di Banten mencapai 53.163,47 ton dengan produksi tertinggi di Kabupaten Serang sebanyak 52.422 ton. Produksi kerang hijau di Banten mencapai 1.919 ton dengan produksi tertinggi Kabupaten Tangerang sebanyak 1.437 ton. Produksi bandeng di Banten mencapai 8.790 ton dengan produksi tertinggi di Kabupaten Tangerang sebanyak 5.726 ton. Sedangkan untuk produksi udang di Banten mencapai 882 ton dengan produksi tertinggi di Kabupaten Serang sebanyak 516 ton.

12. Pertambangan dan Energi

Banten memiliki dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa – Bali, yaitu PLTU Suralaya di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten Pandeglang. Sedangkan, distribusi listrik PLN di Banten dilakukan oleh PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT PLN Distribusi Provinsi Banten dan DKI Jakarta.

Jumlah energi listrik yang terjual di Banten pada tahun 2012 mencapai 18,89 juta MWh, dengan hampir dua per tiga nya dibeli oleh pelanggan industri (12,35 juta MWh). Pelanggan rumah tangga meskipun jumlahnya lebih banyak tapi mengkonsumsi energi listrik hanya sebesar 20,81%. Rasio elektrifikasi di Provinsi Banten pada tahun 2012 adalah sebesar 81,04%.

13. Industri dan Perdagangan

Berdasarkan data kontribusi PDRB Provinsi Banten selama 2 (dua) tahun terakhir, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar yakni sebesar 46,52% dan 46,05% pada triwulan I-II tahun 2012 dan tahun 2013. Berdasarkan harga konstan 2000, Pada tahun 2013, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar kepada kelompok sektor sekunder yakni sebesar Rp 12.607,61 Miliar. Secara keseluruhan, industri di Provinsi Banten baik berskala besar dan sedang maupun mikro dan kecil mengalami pertumbuhan produksi yang positif. Hal ini pun memberikan pengaruh yang positif kepada peningkatan nilai tambah industri yang kemudian berdampak pada peningkatan PDRB Provinsi Banten. Pada triwulan III tahun 2013

sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 4.75% dan berandil sebesar 1.57% dari total LPE.

Sedangkan pada sektor perdagangan, kontribusi PDRB Provinsi Banten selama 2 (dua) tahun terakhir, memberikan kontribusi terbesar kedua yakni sebesar 19.24% dan 19,63, pada tahun 2012 dan triwulan III tahun 2013. Sektor perdagangan mengalami penurunan laju pertumbuhan menjadi sebesar 6,03% pada triwulan III tahun 2013 dibandingkan triwulan III tahun 2012 yang mencapai pertumbuhan 9.94%.

14. Pariwisata

Sebagai daerah yang selama ini dikenal dengan wisata pantainya, di Banten pada tahun 2012 terdapat 259 usaha akomodasi dengan 7.776 kamar dan 12.657 tempat tidur. Dari seluruh usaha akomodasi tersebut, 3.514 kamar tersedia di hotel berbintang dan 4.262 kamar terdapat pada hotel non bintang. Jumlah hotel berbintang sendiri sebanyak 42 unit dengan jumlah tamu yang menginap sebanyak 760.000 orang, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat hunian kamar hotel non bintang yang mencapai 680.000 orang.

Secara keseluruhan pada tahun 2012 jumlah tamu yang menginap di Hotel mencapai 1,44 juta orang, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 0,1 juta orang dan 1,3 juta wisatawan nusantara, di tahun 2012 wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara menginap di hotel berbintang ataupun hotel non bintang mengalami penurunan dan rata-rata hanya menginap 1.15 hari dari 1.21 hari pada tahun 2011.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Sektor perbankan di Banten baik konvensional maupun syariah selama periode 2010-2011 telah menunjukkan pencapaian kinerja yang mengembirakan. Hal ini terlihat dengan bertambahnya pangsa pasar perbankan, dimana jumlah kantor bank dan nasabah secara total masing-masing meningkat dari 636 unit dan 3,40 juta nasabah pada tahun 2010 menjadi 646 unit dan 3,71 juta nasabah pada tahun 2011. Disamping itu, jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun sampai akhir tahun 2011 secara total juga meningkat hingga mencapai 70,17 triliun rupiah, padahal pada tahun 2010 masih sebesar 56,83 triliun rupiah. Adapun

total pinjaman yang disalurkan oleh kalangan perbankan baik konvensional maupun syariah untuk lokasi proyek di Banten sampai akhir tahun 2011 mencapai 112,22 triliun rupiah, lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 81,71 triliun rupiah. Kredit berdasarkan lokasi bank pada tahun 2012 mencapai angka 64,29 triliun sedangkan kredit berdasarkan lokasi proyek pada tahun 2012 sebesar 152,62 triliun, pada tahun 2013 keduanya mengalami kenaikan dimana kredit berdasarkan lokasi bank menjadi 73,63 triliun dan kredit berdasarkan lokasi proyek meningkat hingga menembus angka 172,42 triliun.

Tabel 2.6
Indikator Perbankan Provinsi Banten Tahun 2012-2013

Indikator	2012				2013		
	I	II	III	IV	I	II	III
Perbankan							
Dana Pihak Ketiga (dalam Rp triliun)	72,73	76,66	81,45	88,44	89,04	92,35	101,39
▪ Tabungan	25,38	27,08	29,31	32,77	33,18	34,64	36,47
▪ Giro	14,75	15,66	16,41	20,92	18,24	20,75	24,88
▪ Deposito	32,60	33,92	35,73	34,75	37,62	36,96	40,04
Kredit–Berdasarkan Lokasi Bank (dalam Rp triliun)	53,47	59,03	61,84	64,29	63,49	67,70	73,63
▪ Modal Kerja	17,02	18,88	20,61	21,99	21,96	24,02	26,60
▪ Konsumsi	31,50	34,82	34,82	35,31	34,46	35,82	38,59
▪ Investasi	4,95	5,33	6,42	6,99	7,07	7,86	8,83
Kredit–Berdasarkan Lokasi Proyek (dalam Rp triliun)	117,35	132,991	138,53	152,62	157,53	165,19	172,42
▪ Modal Kerja	49,22	60,21	59,40	66,31	68,05	66,23	69,81
▪ Konsumsi	38,58	41,21	43,77	46,84	48,50	51,32	53,64
▪ Investasi	29,55	31,57	35,35	39,47	40,99	47,64	48,98
Loan to Deposit Ratio (%)	73,52	77,00	75,93	72,69	71,30	73,32	72,62
NPL Gross (%)	1,92	1,79	1,86	1,64	1,88	1,83	1,73
Sistem Pembayaran							
<i>Transaksi RTGS</i>							
▪ Rata-rata Harian Nominal Transaksi (dalam Rp triliun)	0,70	0,79	0,79	0,88	0,92	0,91	0,87
▪ Rata-rata Harian Volume Transaksi	880	1.021	1.080	1.195	1.091	1.136	1.064
<i>Transaksi Kliring</i>							
▪ Rata-rata Harian Nominal Transaksi (dalam Rp triliun)	8,43	9,33	9,42	9,32	9,44	9,66	10,10
▪ Rata-rata Harian Volume Transaksi	344	340	339	335	309	280	295

Sumber Data: BI (Kajian Ekonomi Regional Provinsi Banten Triwulan IV Tahun 2013)

Banten menjadi salah satu daerah tujuan investasi di Indonesia, dengan total nilai investasi yang masuk setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Realisasi nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Banten pada tahun 2012 mencapai 2,5 triliun rupiah. Sedangkan realisasi nilai penanaman modal asing (PMA) pada tahun 2012 mencapai 1,6 miliar US\$.

Jumlah tenaga kerja pada tahun 2012 yang bekerja pada perusahaan PMA sebanyak 19.172 orang dan pada perusahaan PMDN sebanyak 3.710 orang, sedangkan untuk jumlah perusahaan PMA sebanyak 72 perusahaan dan PMDN sebanyak 18 perusahaan. Rasio daya

serap tenaga kerja pada tahun 2010-2012 dapat dilihat pada **Tabel 2.7** sebagai berikut:

Tabel 2.7
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Di Provinsi Banten
Tahun 2010 - 2012

NO	URAIAN	PMA			PMDN		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
1	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	13.260	9.131	19.172	5.205	4.702	3.710
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	61	56	72	15	16	18
3	Rasio daya serap tenaga kerja	191,80	163,05	266,28	193,60	293,87	206,11

Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2012

2.2 EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2013

Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2013 telah melaksanakan 33 urusan, yaitu 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Penyelenggaraan Urusan tersebut dilaksanakan melalui 78 program dan 870 kegiatan yang dilaksanakan oleh 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2.2.1. Penyelenggaraan Urusan Wajib

Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Provinsi Banten mengacu pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Banten Tahun 2013, sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pendidikan

Pada Urusan Wajib Pendidikan didukung oleh 7 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten, meliputi :

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.
Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 Kegiatan yaitu : Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan TK. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 70,90%. Kurang maksimalnya realisasi fisik tersebut disebabkan oleh kurang maksimalnya penyerapan anggaran. Kurang

maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya selisih penawaran harga dan efisiensi sisa kontrak.

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Mutu, Akses, dan Tata Kelola Sekolah Dasar, Kegiatan Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu dan Tata Kelola SMP, dan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 66,19%. Secara akumulatif pada program ini kurang maksimal, dikarenakan penyerapan anggaran yang kurang optimal. Faktor penyebabnya adalah adanya selisih penawaran harga dan efisiensi sisa kontrak serta beberapa faktor penyebab lainnya.

3) Program Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 4 Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Mutu, Akses dan Tata Kelola SMA, Kegiatan Perluasan Akses, Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan Layanan Khusus, Kegiatan Peningkatan Mutu dan Perluasan Akses Pendidikan Menengah Kejuruan, dan Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebudayaan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,57%.

4) Program Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 4 Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Formal, Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal, Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Formal, dan Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Kependidikan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 97.49%.

5) Program Pendidikan Tinggi.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 1 Kegiatan : Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 94,57%.

6) Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).

Pelaksanaan program ini didukung oleh 6 Kegiatan : Kegiatan Pengembangan program pada BPPNF Provinsi Banten, Kegiatan Peningkatan Sumber Daya dan Penyediaan Peralatan Pada PNF, Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan, Kegiatan Gerakan Pemberantasan Buta Aksara, Kegiatan Perluasan dan Penyelenggaraan Paket A, B dan C, dan Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,68%.

7) Program Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 Kegiatan : Kegiatan Pengembangan Program Balai Tekkom, Kegiatan *Pilot Project* Sekolah Berbasis ICT dan Kegiatan Penyelenggaraan dan Operasional SMAN CMBBS. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a). Permasalahan umum yang dihadapi SKPD Pendidikan dalam rangka pelaksanaan program adalah : 1). Kurang maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi program antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sehingga menyebabkan miskomunikasi dalam menetapkan prioritas program. 2). Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pendidikan, sehingga sebagian besar biaya pendidikan dibebankan kepada pemerintah. Hal ini berdampak langsung terhadap lambatnya kemandirian daerah dalam pembangunan pendidikan. 3). Respon masyarakat terhadap pendidikan rendah, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk investasi masa depan. Faktanya masih terdapat anak usia sekolah di daerah yang belum bersekolah baik pada jalur formal maupun non formal.

- b). Permasalahan khusus berkaitan dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, 1). Distribusi daya tampung siswa yang tidak merata (jumlah ruang kelas tidak seimbang dengan jumlah siswa), disisi lain permasalahan yang dihadapi yaitu kesulitan dalam penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah baru di daerah yang padat penduduk seperti di perkotaan dan daerah industri. 2) Perhatian khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus di Provinsi Banten belum maksimal. 3). Berkaitan dengan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan masalahnya adalah : belum terpenuhinya kebutuhan buku (ratio masih dibawah ideal, 1:1), distribusi perpustakaan dan media pendidikan masih kurang, terutama pada tingkat pendidikan SMP, implikasinya terdapat kecenderungan nilai rata-rata ujian belum mencapai angka target dan tingkat kelulusan belum mencapai 100 %, terutama untuk tingkat pendidikan setara SMP dan SMA.
- c). Peningkatan mutu tenaga pendidik belum maksimal, hal ini terlihat dengan masih banyaknya guru pada tingkat pendidikan SD yang tidak memenuhi standar kelayakan mengajar.
- d). Kualifikasi lulusan sekolah kejuruan belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
- e). Manajemen dan Organisasi
- f). Sistem pengawasan pendidikan terutama penjaminan mutu pendidikan belum optimal dan dukungan terhadap MBS/MPMBS dari pihak sekolah masih kurang.

2) Solusi

- a). Perlu dilakukan mapping daya tampung siswa dan perencanaan penambahan ruang kelas baru, sekolah baru, kelas jauh, atau sekolah satu atap.
- b). Perlu dilakukan perbaikan sistem pendidikan dan pengembangan program pendidikan non formal.
- c). Perlu pengembangan sarana pendidikan seperti perpustakaan, buku dan media pembelajaran lainnya.

- d). Penyesuaian kualifikasi dan peningkatan kualitas tenaga pendidik, yang berimplikasi langsung pada penghargaan (reward) terhadap tenaga pendidik.
- e). Perlu ditingkatkan dan dikembangkan life skill bagi peserta didik sekolah kejuruan melalui kerjasama yang melembaga dengan dunia industri atau lembaga lain (dioptimalkan kembali pola pendidikan sistem ganda).
- f). Perlu pelibatan masyarakat dalam pembangunan pendidikan, melalui peningkatan peran dan fungsi stakeholders
- g). Perlu peningkatan kemampuan manajerial sekolah melalui perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, aktualisasi program, monitoring dan evaluasi yang intensif dan kontinyu, yang berimplikasi langsung terhadap kualitas pendidikan.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Pada Urusan Wajib Kesehatan didukung oleh 6 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Banten dan RSU Malingping, meliputi :

1) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat dan Kegiatan Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi untuk mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 43,23%.

2) Program Pembinaan Upaya Kesehatan.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Banten dengan melaksanakan 11 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan dasar pada Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda, Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin, Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat, Kegiatan Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Rujukan Provinsi Banten (Dana DAK), Kegiatan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Barang Medis RSUD Banten, Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten, Kegiatan Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Pemantauan Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 34,95%.

3) Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan Imunisasi dan Kegiatan Pengendalian Penyakit berbasis lingkungan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 50,27%.

4) Program Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melaksanakan satu Kegiatan, yaitu : Kegiatan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 2,20%.

5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Malingping dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan di RSUD Malingping, Kegiatan Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan, dan Kegiatan Pembinaan, pengembangan, pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 57,21%.

- 6) Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat.
- Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Malingping dan RSUD Banten dengan melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan dan alat kesehatan RSUD Malingping, Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda Provinsi, Kegiatan Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, Kegiatan Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Surveillance Kesehatan Kerja, Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat pekerja dan masyarakat dilingkungan kerja, Kegiatan Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Malingping (Dana DAK), Kegiatan Penyediaan Rekam Medis dan Pelaporan, dan Kegiatan Penyediaan Sistem Informasi Manajemen RS. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 37,54%.

Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
 - a. Pada program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak dengan realisasi sebesar 43,23%, dimana salah satu kegiatannya adalah pembinaan gizi masyarakat dengan tolok ukur pengadaan PMT untuk buffer stock dan hibah yang penganggarnya pada Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun 2013 tidak dapat direalisasikan karena terkendala dalam proses pengadaan barang dan jasa;
 - b. Pada program pembinaan upaya kesehatan dengan realisasi sebesar 34,95%, terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya memerlukan penjelasan sebagai berikut :
 - a) Untuk kegiatan pembinaan kesehatan dasar pada masyarakat, dengan tolok ukur rehab berat puskesmas di Kabupaten Serang yang salah satunya puskesmas Ciomas tidak dapat direalisasikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kontrak kerja selama 120 (seratus dua puluh) hari. Dengan realisasi pelaksanaan sebesar 70,00%;
 - b) Pada kegiatan peningkatan upaya kesehatan di Rumah Sakit dan Labkesda dengan realisasi sebesar 39,75% :

- Pembangunan gedung manajerial dan ruang rawat inap RSUD Rujukan Provinsi Banten sampai dengan akhir masa pelaksanaan pekerjaan hasil dari laporan konsultan pengawasan realisasi pekerjaan baru mencapai 56,71%
 - Penyedia sarana penunjang pelayanan kesehatan di RSUD Rujukan Provinsi Banten telah dilaksanakan addendum nilai kontrak disesuaikan dengan harga yang ada pada *Delivery Order* item alat kesehatan
 - Pembangunan lanjutan gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Banten sampai dengan akhir masa pelaksanaan pekerjaan hasil dari laporan konsultan pengawasan realisasi pekerjaan baru mencapai 51,91%
- c) Pada kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat dengan realisasi sebesar 58,28%, pada tolok ukur penyediaan pakaian kerja lapangan (seragam Kader) yang penganggarannya pada Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun 2013 tidak dapat direalisasikan karena terkendala teknis pengadaan barang dan jasa.
- d) Pada kegiatan sarana pendukung pelayanan kesehatan RSUD Banten (Dana DAK) dengan realisasi sebesar 2,33%, tolok ukur pengadaan alat-alat kedokteran/sarana penunjang BDRS dan IGD RSUD Banten tidak dapat direalisasikan karena terkendala teknis pengadaan barang dan jasa.
- c. Pada program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan kegiatan peningkatan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai standar pelayanan dengan realisasi sebesar 31,87%, pada tolok ukur penyediaan sarana pendukung untuk pelatihan tenaga kesehatan Rumah Sakit Provinsi Banten, penyediaan sarana dan prasarana pendukung organisasi profesi penyedia jasa (pihak ke tiga) tidak memenuhi syarat administrasi berupa jaminan pelaksanaan setelah

diumumkan pemenang pengadaan untuk diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak :

- a) Pada kegiatan peningkatan kajian, informasi dan pengembangan upaya kesehatan dengan realisasi sebesar 73,48%, pada tolok ukur penyediaan master plan pusat pengobatan dan perawatan penyakit paru, gigi dan mulut serta master plan balai kesehatan jiwa masyarakat yang penganggarannya pada Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun 2013 tidak dapat direalisasikan karena terkendala teknis pengadaan barang dan jasa.
- d. Pada program peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dengan realisasi sebesar 37,54% pada kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pekerja dan masyarakat di lingkungan kerja pada tolok ukur perbekalan obat-obatan tidak bisa dilaksanakan sehubungan dengan proses melalui e-catalog ketersediaan obatnya terbatas.
- e. Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan dilaksanakan oleh Kegiatan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan dengan realisasi sebesar 2,20%, tidak dapat direalisasikan karena terkendala teknis pengadaan barang dan jasa.

Dengan rendahnya capaian realisasi program tersebut diatas berdampak pada rendahnya realisasi capaian pada indeks kesehatan masyarakat.

2) Solusi

- a. Solusi pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan :
 - a) Untuk kegiatan pembinaan kesehatan dasar pada masyarakat, dengan tolok ukur rehab berat Puskesmas Ciomas di Kabupaten Serang telah dianggarkan kembali pada pos bantuan keuangan Tahun Anggaran 2014 kepada Pemerintah Kabupaten Serang ;
 - b) Pada kegiatan peningkatan upaya kesehatan di Rumah Sakit dan Labkesda akan dilanjutkan kembali Pembangunannya;

- c) Pada kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat, kesda akan dilanjutkan kembali pelaksanaannya;
 - d) Pada kegiatan sarana pendukung pelayanan kesehatan RSUD Rujukan Provinsi Banten (Dana DAK), untuk alat kesehatan kedokteran/sarana penunjang BDRS dan alat IGD RSUD Banten dianggarkan kembali pengadaannya pada Tahun Anggaran 2014.
 - e) Pada program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan kegiatan peningkatan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai standar pelayanan akan dilanjutkan kembali pelaksanaannya.
- b. Perlu dilaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan LKPP untuk penyediaan obat-obatan.

3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup didukung oleh 2 program yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. Program dimaksud, meliputi :

- 1) Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3, Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, Kegiatan Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, dan Kegiatan Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 93,39%.
- 2) Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Konservasi dan

Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam, Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air, Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, dan Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Raya. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Permasalahan yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten dalam merealisasikan anggaran masih terdapat kegiatan yang mengalami sedikit keterlambatan dalam hal pelaksanaannya, dan dalam penyerapan keuangan terdapat kegiatan yang penyerapannya rendah, yaitu pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Perkantoran dengan realisasi sebesar 46,2% hal ini disebabkan jadwal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (khususnya pengadaan komputer dan server) setelah APBD perubahan dan harga dan spesifikasi barang tidak sesuai lagi dengan harga kondisi aktual dipasar sehingga untuk pengadaan barang tersebut tidak bisa dilaksanakan.
- b. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, saat ini kualitas lahan di Provinsi Banten memiliki kecenderungan penurunan kuantitas salah satunya ditentukan oleh faktor penutupan lahan. Hal ini dimungkinkan semakin berkembangnya Banten sebagai daerah pemekaran provinsi baru dan posisi Provinsi Banten yang dekat dengan pusat pertumbuhan yaitu Ibukota DKI Jakarta sehingga proses konversi lahan sangat tinggi. Kekhawatiran yang muncul adalah, apabila tidak ada langkah-langkah penanganan untuk mengelola lahan yang masih tersedia maka kelangsungan penutupan lahan di Provinsi Banten akan semakin turun dan terancam.

2) Solusi

- a). Pengadaan barang yang tidak dilaksanakan akan ditindaklanjuti pada perencanaan program ditahun mendatang.
- b). Perlu dilakukan upaya terpadu dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada daerah-daerah tertentu sesuai fungsi dan peruntukannya.

4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum.

Pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum didukung oleh 3 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, dan Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman. Program-program pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum, meliputi :

- 1) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang dengan melaksanakan 16 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembangunan Jalan Wilayah Utara, Kegiatan Pembangunan Jalan Wilayah Selatan, Kegiatan Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Utara, Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Selatan, Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong Jalan, Kegiatan Pembangunan TPT, Talud dan Bronjong, Kegiatan Pengadaan Lahan Kebinamargaan, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan, Kegiatan Pengadaan alat-alat ukur kebinamargaan dan Pengujian Kualitas Bahan, Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Utara, Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Selatan, Kegiatan Pembangunan Jalan Prioritas Tahun Jamak, Kegiatan Pendataan Leger Jalan, dan Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Perijinan Bidang Bina Marga dan Tata Ruang. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 59,13%.

2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman dengan melaksanakan 19 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air lainnya, Kegiatan Pengadaan Lahan Pengairan, Kegiatan Pengelolaan Kualitas Air Pada Daerah Aliran Sungai, Kegiatan Pngendalian Banjir, Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane, Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau, Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna, Kegiatan Pengadaan Bahan Banjiran, Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai, Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna, Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau, Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane, Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sumber Daya Air, Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Perizinan Bidang Sumber Daya Air, Kegiatan Perencanaan Teknis Sungai, Irigasi, Embung dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pemukiman dan SDA Terpadu, Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air, dan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Lanjutan). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 78,49%.

3) Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman dengan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih, Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan, Kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan, Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat Pertumbuhan, Kegiatan Perencanaan Pengembangan

Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman, Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Penunjang Lainnya, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di KP3B, Kegiatan Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan, Kegiatan Perencanaan DED Gedung Kantor dan Infrastruktur Keciaptakaryaan Lainnya, dan Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 73,94%.

Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten.

- a. Permasalahan

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan permasalahan baik bersifat teknis maupun non teknis, berbagai permasalahan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a) Permasalahan Personil (SDM)

Beberapa hal yang termasuk dalam permasalahan sumberdaya manusia, yaitu:

- Masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintah maupun masyarakat jasa konstruksi dalam hal memahami pentingnya perencanaan pembangunan komprehensif yang menjadi dasar dalam pencapaian sasaran kegiatan. Diakui hal ini dapat terlihat dari beberapa kegiatan yang masih output oriented dan belum mengarah pada outcome oriented atau pencapaian sasaran fungsional yang diinginkan untuk mewujudkan manfaat serta dampak kegiatan pembangunan yang positif.
 - Keterbatasan dan kualitas tenaga terlatih/terampil yang tersedia di lapangan yang secara substantif dapat mempengaruhi kinerja pekerjaan. Demikian juga dengan keterbatasan tersedianya tenaga aparatur yang berpengalaman di bidang pemerintahan atau administrasi pembangunan.

- Adanya keterbatasan dalam jumlah maupun kualitas SDM yang tersedia serta penyebarannya yang masih tidak sesuai dengan TUPOKSI-nya menyebabkan adanya beberapa bagian atau instansi yang mempunyai beban kerja cukup tinggi namun tidak didukung oleh kebutuhan SDM yang proporsional, demikian juga dalam hal rasionalisasi jabatan yang dibutuhkan.
- Masih rendahnya partisipasi dan pengawasan baik oleh aparatur pemerintah maupun oleh masyarakat menyebabkan beberapa kinerja pembangunan secara umum tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan bersama yaitu efisien-efektif.

b) Permasalahan Peralatan

Beberapa hal yang termasuk dalam permasalahan peralatan yaitu meliputi :

- Suasana kerja yang tidak nyaman dan berdesak-desakan, menyebabkan ruang gerak karyawan menjadi terbatas merupakan permasalahan akibat tidak tersedianya ruang kerja atau perkantoran yang representatif, hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas kerja atau kinerja dari suatu instansi.
- Kesulitan dalam pencapaian daerah terpencil yang menyebabkan daerah tersebut masih miskin, terisolir, dan belum tersentuh oleh derap majunya pembangunan, hal ini sebagai akibat adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana transportasi yang tidak dapat mengakses ke daerah tersebut.
- Masih digunakannya teknologi konvensional yang terkesan sederhana merupakan tantangan bagi Provinsi Banten untuk dapat mesejajarkan dirinya dengan propinsi lain di wilayah Indonesia yang telah menerapkan teknologi canggih, terlebih lagi dengan diberlakukannya pasar bebas atau globalisasi, ini akan menjadi permasalahan di kemudian hari

apabila Provinsi Banten kurang siap dengan penerapan teknologi canggih yang lebih efisien.

- Tidak tersedianya instrumen pendataan yang lengkap mengakibatkan keterbatasan dalam penyediaan kebutuhan data pelaksanaan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Banten.

b. Solusi

a). Penyelesaian masalah yang terkait dengan masalah personil atau sumberdaya manusia, maka upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui :

- Peningkatan keterampilan dan kemampuan aparatur/SDM dengan mengikuti pendidikan formal maupun diklat teknis/kursus yang terkait dengan tupoksinya;
- Diperlukan upaya rekrutmen atau pengadaan pegawai sesuai dengan kebutuhan melalui seleksi pegawai secara ketat;
- Upaya peningkatan pengawasan melekat baik secara internal aparatur maupun pengawasan eksternal oleh masyarakat agar pelaksanaan kegiatan tidak penyimpangan terlalu jauh dari perencanaanya.

b). Penyelesaian masalah yang terkait dengan masalah pembiayaan, maka upaya yang dilakukan adalah :

- Penentuan prioritas kegiatan utama yang mendesak untuk dibiayai, dan sifat kegiatan tersebut mempunyai dampak yang luas untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung;
- Perlu pelaksanaan manajemen pengelolaan keuangan yang accountable dan penerapan good governance secara intensif.

c). Penyelesaian masalah yang terkait dengan masalah peralatan, maka upaya yang dilakukan adalah:

- Segera dibangun atau disediakan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai dan representatif agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih lancar;
- Perlu disediakan kendaraan operasional sesuai kebutuhan, terutama untuk pelaksanaan pembangunan yang daerahnya jauh terpencil;
- Dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka upaya yang dibutuhkan adalah pemahaman dan penguasaan teknologi tersebut sesuai kebutuhan yang memberikan hasil lebih efisien.
- Untuk menyediakan data yang lebih valid, maka upaya yang dilakukan adalah inventarisasi data pembangunan yang dilanjutkan dengan sistem pemeliharaan data secara intensif, cepat, tepat, dan akurat.

Hal lain yang sifatnya khusus dan perlu mendapat umpan balik adalah dengan melakukan:

- a). Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan di daerah harus secara intensif dilakukan dalam rangka mendapatkan pemahaman dan persepsi yang sama kepada para pengelola kegiatan untuk memudahkan dalam operasional kegiatan yang akan berjalan;
- b). Penyiapan perencanaan atau pembuatan agenda kerja yang efektif disusun bersama dalam satu forum yang melibatkan *stakeholders* yang membahas perlu tidaknya dilakukan perubahan anggaran dengan mempertimbangkan *constrain* waktu pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
- c). Penjelasan secara teknis diberikan terutama untuk memberikan pemahaman yang sama dalam menghadapi usulan program aspiratif yang sifatnya mendesak.

- d). Pembagian beban kerja dan pelaksanaan TUPOKSI dilakukan terutama untuk beberapa dinas yang mempunyai *load* kerja yang sangat tinggi, yaitu dengan membentuk lembaga pengelola teknis atau unit pelaksana teknis daerah atau dalam bentuk balai sebagai upaya efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 2) Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.
 - a. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi pada tahun 2013 pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten antara lain disebabkan oleh adanya tidak terlaksananya lelang, faktor bencana alam, curah hujan yang cukup tinggi, adanya perubahan desain dan adanya permasalahan internal di pihak kontraktor.
 - b. Solusi

Secara umum solusi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan yang terjadi antara lain :

 - a). Melakukan putus kontrak dan *black list* terhadap penyedia yang bermasalah atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan,
 - b). Melakukan lelang ulang/kontrak baru pada sisa pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran sebelumnya, dan
 - c). Meningkatkan pengawasan yang lebih intensif terhadap program kegiatan dilingkungan SKPD.

5. Urusan Wajib Penataan Ruang.

Pada Urusan Wajib Penataan Ruang didukung oleh 1 Program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, yaitu : Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang dengan melaksanakan 3 Kegiatan, yaitu : Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Ruang, Kegiatan Perencanaan dan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 86,56%.

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Masih rendahnya partisipasi dan pengawasan baik oleh aparaturnya pemerintah maupun oleh masyarakat menyebabkan beberapa kinerja pembangunan secara umum tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan bersama yaitu efisien-efektif.
- b. Kesulitan dalam pencapaian daerah terpencil yang menyebabkan daerah tersebut masih miskin, terisolir, dan belum tersentuh oleh derap majunya pembangunan, hal ini sebagai akibat adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana transportasi yang tidak dapat mengakses ke daerah tersebut.

2) Solusi

- a. Upaya peningkatan pengawasan melekat baik secara internal aparaturnya maupun pengawasan eksternal oleh masyarakat agar pelaksanaan kegiatan tidak penyimpangan terlalu jauh dari perencanaannya.
- b. Tidak tersedianya instrumen pendataan yang lengkap mengakibatkan keterbatasan dalam penyediaan kebutuhan data pelaksanaan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Banten.
- c. Kesulitan dalam pencapaian daerah terpencil yang menyebabkan daerah tersebut masih miskin, terisolir, dan belum tersentuh oleh derap majunya pembangunan, hal ini sebagai akibat adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana transportasi yang tidak dapat mengakses ke daerah tersebut.

6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan.

Pada Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan didukung oleh 3 program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, dan Biro Pemerintahan. Adapun program-program dimaksud adalah :

- 1) Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu: Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tata Pemerintahan, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender, Kegiatan Perencanaan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan, dan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
- 2) Program Pengendalian Pembangunan Daerah.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program APBD, Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya, Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, dan Kegiatan Penyusunan Laporan pelaksanaan APBD. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.
- 3) Program Kerjasama Pembangunan Daerah.
Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan, dan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri. Program Kerjasama Pembangunan Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 82,99%,.

Permasalahan dan Solusi

1). Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten adalah pada tolok ukur kegiatan kerjasama Banten – Jawa Barat

2). Solusi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Dimasa depan tidak hanya meliputi wilayah perbatasan dan pemecahan masalahnya tidak hanya ditangani melalui sinkronisasi program, tetapi perlu dikembangkan melalui efektifitas kerjasama antar daerah.

7. Urusan Wajib Perumahan.

Pada Urusan Wajib Perumahan didukung oleh 1 program yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten, yaitu Program Pembinaan dan Penataan Perumahan. Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu dan Kegiatan Pembinaan dan Penataan Perumahan. Realisasi fisik kumulatif sebesar 92,84%.

8. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Pada Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga didukung oleh 2 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten, yang meliputi :

1) Program Kepemudaan dan Kepramukaan

Pelaksanaan program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Kegiatan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kegiatan Pembinaan Kepramukaan, Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda, Kegiatan Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda dan Penguatan Kelembagaan Kepemudaan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,82%.

2) Program Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga,

Pelaksanaan program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan

penyelenggara Kejuaraan Olahraga, Kegiatan Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus, Kegiatan Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan, Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, Kegiatan Peningkatan SDM Keolahragaan, Kegiatan Peningkatan Prestasi dan pembinaan olahraga, Kegiatan Fasilitas Prasarana dan sarana olahraga dan Kegiatan Pembinaan dan Pendidikan Olahraga. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Terdapat beberapa kegiatan pada tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan sepenuhnya, karena pengadministrasian keuangan yang tidak bisa diselesaikan yang akhirnya kembali ke kas daerah.

2) Solusi

Dalam pengadministrasian keuangan agar dapat segera menyesuaikan waktu.

9. Urusan Wajib Penanaman Modal.

Pada Urusan Wajib Penanaman Modal didukung oleh 2 program yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, meliputi :

1) Program Peningkatan Iklim Investasi.

Pelaksanaan program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan Optimalisasi Regulasi, Fasilitas dan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal, dan Kegiatan Fasilitas Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman Modal. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 83,75%.

2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi, dan Kegiatan Kerjasama Investasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 78,31%.

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a. Hambatan dan Kendala Realisasi Investasi

BKPMPT Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan tujuan pencapaian visi dan misinya untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing, meningkatkan daya tarik penanaman modal serta peningkatan pelayanan realisasi pelaksanaan penanaman modal secara terpadu belum dapat tercapai dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor eksternal yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a) Regulasi Perizinan Penanaman Modal

Kewenangan perizinan penanaman modal belum sepenuhnya secara terpadu dapat dilaksanakan tingkat provinsi atau kabupaten/kota,

b) Ketersediaan Sumber Energi

Terjadinya krisis energi (listrik) dan kenaikan bahan bakar akan menghambat dan menambah resiko produksi.

c) Dukungan Infrastruktur Daerah

Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana jalan (darat) dan sering terjadinya kemacetan, menambah waktu tempuh dan resiko pendistribusian hasil produksi.

d) Keamanan

Masih terdapat gangguan keamanan terhadap kegiatan investasi, baik dalam proses produksi maupun distribusi, sehingga tidak memberikan kenyamanan bagi para investor.

e) Insentif Daerah

Belum adanya suatu peraturan daerah tentang pemberian kemudahan tertentu kepada calon investor untuk merangsang realisasi investasi baru dan perluasan investasi.

b. Hambatan Kendala Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2013

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung anggaran daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun 2013,

BKPMPT pada Tahun 2013 tidak dapat merealisasikan anggaran sesuai perencanaan, disebabkan kendala sebagai berikut :

- a) Beberapa kegiatan, baik yang bersifat swakelola maupun kegiatan pengadaan barang maupun jasa mengalami efisiensi anggaran,
 - b) Efisiensi yang cukup besar pada kegiatan Belanja Langsung, pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi pada tolok ukur publikasi investasi melalui media out door.
 - c) Pada kegiatan penyelenggaraan promosi, khususnya dalam tolok ukur Banten Investment Forum di Jakarta, Banten Investment Forum di Singapura dan promosi investasi di media cetak penerbangan mengalami perubahan target kinerja dikarenakan penyesuaian agenda kegiatan serta kenaikan biaya pemasangan iklan di media penerbangan sehingga anggaran pada tolok ukur tersebut dialihkan untuk penambahan tolok ukur baru (workshop di Kabupaten Pandeglang, FDG promosi Investasi Sektoral dan Jakvest) dan melengkapi kebutuhan tolok ukur lain yang belum teranggarkan.
- c. Upaya Peningkatan Realisasi Investasi
- Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya meningkatkan realisasi investasi ditahun 2013, telah mencanangkan program peningkatan iklim investasi dan program promosi dan kerjasama investasi dengan PTSP sebagai ikon dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh BKPMPT Provinsi Banten selain 3 (tiga) program penunjang lainnya. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan realisasi investasi adalah :
- a) Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Perizinan
- Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha, khususnya para investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Banten, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten

telah melaksanakan pelayanan perizinan terpadu baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Pelayanan Terpadu Satu di Bidang Penanaman Modal, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.

Untuk menyempurnakan pelayanan perizinan yang efisien dengan pembentukan PTSP tersebut, dilakukan penyiapan regulasi pendukung, serta pembinaan dan advokasi terhadap SKPD kabupaten/kota penyelenggara PTSP.

b) Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Penanaman Modal

Program ini memuat kegiatan-kegiatan berupa pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh aspek yang terkait dalam pelaksanaan penanaman modal.

Kegiatan pembinaan dilaksanakan dalam rangka membentuk suatu pemahaman dari seluruh stakeholder (pemerintah, masyarakat umum, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya) akan pentingnya penanaman modal bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan sosial.

Pembinaan dilakukan pula terhadap terciptanya kemitraan antara investor dengan pelaku usaha lokal (masyarakat) sekitar kegiatan investasi, dengan pengaturan pola kemitraan yang saling menguntungkan.

Sedangkan kegiatan pengendalian penanaman modal ditujukan untuk memantau perkembangan kegiatan

investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan penanaman modal serta melakukan upaya preventif akan terjadinya permasalahan yang dihadapi pelaku investasi dan lingkungan sekitarnya.

Peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan permasalahan investasi yang terjadi yaitu dengan optimalisasi Task Force Penanganan Permasalahan Investasi Provinsi Banten yang telah dibentuk pada tahun 2011.

Tim yang beranggotakan lintas instansi ini secara aktif akan memfasilitasi dan membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh para investor dan masyarakat yang berpotensi besar mengganggu kegiatan investasi yang telah ada maupun yang akan direalisasikan.

c) Promosi Unggulan Daerah yang Terintegrasi

Untuk menjadikan wilayah Banten sebagai lokasi penanaman modal yang paling diminati, BKPMPT Provinsi Banten melaksanakan strategi promosi yang mengintegrasikan potensi unggulan daerah, potensi wisata, sumber daya alam dan potensi lokasi/kawasan.

Strategi promosi *Trade, Tourism, and Investment (TTI)* dimaksudkan agar kegiatan yang memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar ini dapat lebih tepat sasaran, yaitu informasi tentang potensi dan peluang usaha langsung terserap oleh calon investor, pedagang dan wisatawan secara bersamaan dalam satu kegiatan promosi yang dilakukan baik di dalam dan luar negeri.

Dengan program dan kegiatan tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal di Provinsi Banten akan terus meningkat dan membawa kemanfaatan yang besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Banten.

2) Solusi

Upaya penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan APBD TA. 2013

- a. Melakukan rapat koordinasi evaluasi bulanan kegiatan secara intensif dengan para Koordinator PPTK, dan PPTK terhadap evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana kegiatan bulan berikutnya.
- b. Terhadap adanya beberapa kegiatan yang jadwal pelaksanaannya mengikuti instansi lain baik pusat maupun daerah yang pelaksanaannya menunggu kepastian jadwal yang disesuaikan sehingga tidak sesuai dengan rencana operasional kegiatan yang telah direncanakan diantaranya kegiatan Promosi Investasi Luar Negeri adalah dengan melakukan koordinasi yang intensif terhadap panitia penyelenggara dan diupayakan untuk tahun yang akan datang kondisi tersebut dapat dihindari sehingga tidak merubah jadwal yang direncanakan serta penentuan lokasi kegiatan agar lebih fleksibel dan perhitungan anggaran perjalanan dinasnya mengikuti kurs dolar, tidak dapat diprediksi dengan pasti, sehingga dalam perencanaan kedepan diperlukan ketelitian dan proyeksi yang lebih akurat.
- c. Upaya yang dilakukan adalah dengan memperketat jadwal kegiatan dan diharapkan untuk tahun yang akan datang diharapkan tidak merubah tolok ukur tetapi diusahakan melalui pergeseran kegiatan.

10. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, meliputi :

- 1) Program Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM. Pelaksanaan program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengembangan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kegiatan Pengembangan usaha Koperasi bidang industri hasil pertanian, Kegiatan Pengembangan usaha Koperasi bidang aneka usaha, dan Kegiatan Peningkatan kompetensi usaha kecil, menengah dan

pengelola koperasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

- 2) Program Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM.
Pelaksanaan program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi bisnis, Kegiatan Dukungan promosi dan pemasaran produk serta peningkatan kapasitas kerjasama dan jaringan usaha, dan Kegiatan Penyediaan fasilitas pengembangan teknologi, pasar dan pemasaran produk unggulan K-UMKM. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,52%.
- 3) Program Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM.
Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, dan Kegiatan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
 - a. Terkait dengan Peningkatan Peningkatan Daya Saing, kapasitas kelembagaan dan SDM KUMKM masih tingginya jumlah Koperasi yang tidak aktif pada tahun 2013 sebesar 2.385 Koperasi dibandingkan tahun 2012 sebesar 2.163 Koperasi.
 - b. Monitoring dan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan, masih belum optimal sehingga dampak yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sulit untuk di diketahui lebih cepat.
- 2) Solusi
 - a. Perlu adanya Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dan pendamping UMKM yang memadai baik dilihat dari Kualitas SDM dan Kuantitasnya sehingga pembinaan yang dilakukan terhadap Koperasi dapat lebih terarah.
 - b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi yang bersifat *early detection* harus dapat dilaksanakan secara berkala.

11. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pada Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil didukung oleh Program Penataan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Provinsi Banten, dengan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan dan Penataan Kependudukan, dan Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan.

Pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan didukung oleh 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, yaitu :

- 1) Program Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Pelaksanaan program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, Kegiatan Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan tenaga Kerja Perempuan dan anak, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja, Kegiatan Fasilitasi Penetapan UMP, dan Kegiatan Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

- 2) Program Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha.

Program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pelatihan Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan Tenaga Daerah, Kegiatan Rekrutmen dan Seleksi Pemagangan ke Jepang, Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, dan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 93,73%.

- 3) Program Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja.

Program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Provinsi Banten, dan Kegiatan Sosialisasi BLKI, Penyusunan Kurikulum dan Penempatan Hasil Lulusan BLKI Provinsi

Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,45%.

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Permasalahan yang terjadi pada program/kegiatan wajib yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih mengarah kepada kendala teknis pelaksanaan. seperti misalnya : Perubahan lokasi kegiatan, Perubahan waktu pelaksanaan kegiatan, Kurangnya anggaran yang tersedia, sehingga ada beberapa kegiatan yang target kinerjanya dikurangi, Kurangnya SDM/Aparatur Dinas.

2) Solusi

Perlu adanya perencanaan yang sangat matang baik tentang lokasi pelaksanaan, waktu pelaksanaan, serta pihak-pihak lain yang nantinya akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, perlu juga adanya penambahan jumlah personel aparatur dinas agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan.

Pada Urusan Wajib Ketahanan Pangan didukung oleh Program Ketahanan Pangan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten, yang dilaksanakan melalui 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengelolaan dan Penanganan Kerawanan Pangan, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Ketersediaan dan Akses Pangan, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan, Kegiatan Pengendalian Program Bantuan Raskin, Kegiatan Pembinaan, Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Pangan, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, dan Kegiatan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a). Permasalahan umum terkait dengan tugas pokok BKPP Provinsi Banten dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan di Provinsi Banten, antara lain : 1). Masalah alih fungsi lahan, menurunnya produktivitas, lambatnya pengembangan cadangan pangan, dan peningkatan jumlah penduduk, dan bencana alam pola konsumsi, keamanan dan kenyamanan pangan, rendahnya tingkat pendapatan dan distribusinya, yang menyebabkan kerawanan pangan dan dapat mengancam ketahanan pangan. 2). Disisi lain masih lemahnya kelembagaan pertanian belum mendukung pembangunan dibidang ketahanan pangan.
- b). Permasalahan khusus terkait dengan tugas pokok BKPP Provinsi Banten dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan di Provinsi Banten, antara lain : 1) belum optimalnya fungsi koordinasi antar lembaga/instansi terkait dengan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan, 2) keterbatasan sarana/prasarana penunjang kegiatan (penataan, pengaturan dan kelengkapan), yang berdampak terhadap rendahnya pelayanan publik, 3) Terbatasnya sumber daya aparatur Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten.

2) Solusi

- a. Penyelesaian masalah dan umpan balik terkait dengan masalah umum, dilaksanakan melalui :
 - a) Meningkatkan koordinasi baik dilingkup SKPD, maupun antar instansi terkait.
 - b) Mengembangkan kajian tentang ketahanan pangan di Provinsi Banten, yang berdampak langsung terhadap penanganan ketersediaan pangan.
 - c) Upaya-upaya revitalisasi organisasi/kelembagaan pertanian.

- b. Penyelesaian masalah dan umpan balik terkait dengan masalah khusus, dilaksanakan melalui:
 - a) Optimalisasi fungsi koordinasi antar lembaga/instansi terkait dengan bidang ketahanan pangan.
 - b) Optimalisasi sarana/prasarana penunjang kantor dan kegiatan yang ada dengan segala keterbatasan secara efisien, efektif dan berdaya guna, berorientasi pada kepuasan pelayanan publik/masyarakat.
 - c) Optimalisasi sumber daya aparatur Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten.

14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan perlindungan dan tumbuh kembang anak, Kegiatan Penguatan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan dunia usaha, Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kegiatan Penguatan Organisasi Perempuan, Kegiatan Penguatan Jaringan Kerja Pengarusutamaan Gender, Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dan Kegiatan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi peningkatan kualitas hidup perempuan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Masalah yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten dalam pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2013 adalah:

- a. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten yang cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.

- b. Sumber Daya Manusia aparatur BPPMD Provinsi Banten masih perlu ditingkatkan kemampuannya. Hal ini disebabkan oleh cepatnya dinamika perkembangan masyarakat yang senantiasa menuntut perbaikan pelayanan pemerintah serta terus berkembangnya arus ilmu dan teknologi juga menuntut kesiapan aparat untuk memiliki kemampuan yang adaptif dengan perkembangan IPTEK tersebut.
 - c. Mengembangkannya tugas pokok dan fungsi pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan urusan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten/Kota yang tidak tergabung dalam satu SKPD, sehingga menyulitkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.
 - d. Luasnya beban kerja pelayanan tugas pokok dan fungsi baik urusan Pemberdayaan Perempuan maupun urusan Pemberdayaan Masyarakat, sehingga sulit ditangani oleh satu SKPD yaitu BPPMD.
- 2) Solusi
- a. Koordinasi yang intensif dan terencana dengan output yang jelas.
 - b. Meningkatkan kualitas SDM dilingkup BPPMD.
 - c. Peninjauan ulang beban kerja BPPMD.

15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pada Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melaksanakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana. Program ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten yang didukung 1 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Program Keluarga Berencana. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 100%.

16. Urusan Wajib Perhubungan.

Pada Urusan Wajib Perhubungan didukung oleh Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten dengan melaksanakan 14 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan, Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan,

Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang pada UPT Serang, Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang pada UPT Tangerang, Kegiatan Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Perhubungan Udara, Kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan laut dan Penyeberangan, Kegiatan Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Angkutan Laut, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api, Kegiatan Penyelenggaraan Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang, Kegiatan Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan pada UPT Serang, Kegiatan Penataan dan Peningkatan Pelayanan Perhubungan pada UPT Tangerang, dan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Dana DAK). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Permasalahan atau kendala yang terdapat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang adalah :
 - a) Kompetensi SDM relatif belum memadai, dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan dalam bidang hubkominfo di wilayah Provinsi Banten perlu didukung sumber daya manusia profesional yang mampu mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan yang diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai, oleh karena itu selain melalui penambahan jumlah aparatur sebagaimana program Pemerintah Provinsi Banten juga perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal.

- b) Sarana dan Prasarana kerja belum memadai, dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga keterbatasan sarana dan prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.
 - b. Masih adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota juga merupakan hal yang harus diselesaikan bersama melalui kegiatan rapat-rapat koordinasi yang intensif.
- 2) Solusi
- a. Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis yang berkenaan dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten, maka yang menjadi 'faktor kunci keberhasilan' dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:
 - a) Kemantapan struktur organisasi dan prosedur operasi baku (standard operating procedure) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten sebagai penanggung jawab penyelenggaraan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
 - b) Kecukupan, kedisiplinan, keahlian, kreatifitas, dan kehandalan sumberdaya manusia (SDM) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
 - c) Kecukupan (kuantitas dan kualitas) dan kemutakhiran sarana dan prasarana kerja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,

- d) Kemitraan yang sinergis dengan SKPD Provinsi, Pemerintah Kab./Kota dalam wilayah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
- e) Dukungan ketersediaan dan kelancaran pembiayaan yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
- f) Motivasi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten untuk bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,
- b. Performa pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten secara cepat, tepat dan berkualitas.

17. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika.

Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika didukung oleh Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika yang dilaksanakan oleh Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan Sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE dan Sarana Prasarana LPSE, Kegiatan Pengembangan Telekomunikasi dan Telematika, Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyiaran, Kegiatan Penyelenggaraan Sarana Telekomunikasi dan Desiminasi Informatika, Kegiatan Fasilitasi Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi, Kegiatan Fasilitasi Komisi Informasi, dan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan ULP dan Sarana Prasarana ULP. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 90,09%.

Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah :

a. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi lebih disebabkan akibat kendala dan hambatan pada sistem birokrasi administrasi pelaksanaan kegiatan, sistem penjadualan pelaksanaan kegiatan dan keterbatasan SDM. Adapun rincian permasalahan secara umum yaitu adanya perubahan pos anggaran (perubahan DPA) sehingga skema pelaksanaan dan tolok ukur turut berubah dan adanya penerapan sistem SIMDA yang belum sepenuhnya dipahami oleh SDM Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten.

b. Solusi

Pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten perlu adanya Perencanaan yang matang, sehingga pada pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, dan perlu adanya penempatan pegawai yang sesuai dengan bidangnya.

2) Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah :

a. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang terdapat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang adalah:

a) Kompetensi SDM relatif belum memadai, dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan dalam bidang hubkominfo di wilayah Provinsi Banten perlu didukung sumber daya manusia profesional yang mampu mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan yang diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai, oleh karena itu selain melalui penambahan jumlah aparatur sebagaimana program Pemerintah Provinsi Banten juga

perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal.

- b) Sarana dan Prasarana kerja belum memadai, dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga keterbatasan sarana dan prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.
- c) Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang hubkominfo. Pelayanan sektor perhubungan, komunikasi dan informatika memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga untuk mewujudkan fungsi pelayanan dimaksud maka diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana hubkominfo baik melalui APBD maupun APBN.
- d) Masih adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota juga merupakan hal yang harus diselesaikan bersama melalui kegiatan rapat-rapat koordinasi yang intensif.

b. Solusi

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis yang berkenaan dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten, maka yang menjadi 'faktor kunci keberhasilan' dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a). Kemantapan struktur organisasi dan prosedur operasi baku (*standard operating procedure*) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi

Banten sebagai penanggung jawab penyelenggaraan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,

- b). Kecukupan, kedisiplinan, keahlian, kreatifitas, dan kehandalan sumberdaya manusia (SDM) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
 - c). Kecukupan (kuantitas dan kualitas) dan kemutakhiran sarana dan prasarana kerja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
 - d). Kemitraan yang sinergis dengan SKPD Provinsi, Pemerintah Kab./Kota dalam wilayah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
 - e). Dukungan ketersediaan dan kelancaran pembiayaan yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
 - f). Motivasi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten untuk bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,
 - g). Performa pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten secara cepat, tepat dan berkualitas.
- 3) Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah :
- a. Permasalahan
 - a) Dikarenakan keterbatasan waktu yang ada menjadi tantangan yang paling utama, sehingga alokasi

anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak terserap seluruhnya.

- b) Terjadi pemindahan alat pantau siaran yang menyebabkan terganggunya hardware alat pantau siaran, sehingga pemantauan siaran dilakukan tidak optimal.
- c) Terdapat sisa anggaran yang tidak terserap, dikarenakan adanya pengembalian kendaraan roda empat kepada Biro Aset dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten pada Bulan November 2013.

18. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pada Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri didukung oleh Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Budaya Politik Masyarakat di Provinsi Banten, Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Politik, Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Kegiatan Peningkatan Pembauran Kerukunan dan Kewarganegaraan, Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan dini dan penanganan konflik, Kegiatan Fasilitasi Penanganan Masalah Perbatasan dan Orang Asing, dan Kegiatan Fasilitasi pengawasan dan pemantauan ketahanan ekonomi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 93,26%.

Permasalahan dan Solusi

1). Permasalahan

Secara umum pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sebanyak 15 kegiatan yang didanai APBD Provinsi Banten TA. 2013 berjalan sesuai dengan rencana, serta tidak mengalami hambatan.

2). Solusi

Bagi kegiatan yang pelaksanaannya berlokasi di Kabupaten/Kota agar lebih ditingkatkan kembali aspek koordinasi supaya terjalin harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah

Kabupaten/Kota khususnya yang menangani fungsi kesatuan bangsa dan politik.

19. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian didukung oleh 14 Program yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Banten (42 SKPD), program-program dimaksud adalah :

- 1). Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, dan Kantor Penghubung Provinsi Banten. Pada program dimaksud melaksanakan 42 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pusat dan Daerah, Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Masalah Sosial, Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah, Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten, Kegiatan Fasilitas Koordinasi, Konsultasi, Raker Kunker, Pejabat Pemda, Pusat dan Tamu, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Nilai-nilai Kejuangan, Kegiatan Desk Pemilukada Provinsi Banten, Kegiatan Penataan Daerah Otonom, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Penguatan Lembaga Sosial, Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan

Kebijakan Keluarga Berencana, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi Banten, Kegiatan Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah, Kegiatan Partisipasi Anjungan Banten di TMII, Kegiatan Hubungan dan Kerjasama Pers, Kegiatan Sarana Komunikasi, Kegiatan Liputan dan Pengelolaan Dokumen, Kegiatan Pengembangan Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, Kegiatan Penerbitan Media dan Teknologi Informasi, Kegiatan Aspirasi dan Pengelolaan Opini Publik, Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi Publik, Kegiatan Pelayanan dan Jaringan Informasi Publik, Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kegiatan Keprotokolan, Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pimpinan, Kegiatan Pelayanan Tamu, Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan, Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UKM, Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan Keuangan Daerah, Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Infrastruktur Perekonomian, Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Harga dan Barang Beredar, Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi, Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kerjasama Perekonomian Investasi dan Industri, Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu 2014, dan Kegiatan Pengadaan Data dan Informasi Pendukung Pemekaran Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 91,56%.

- 2). Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Banten dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi Pengamanan dan Pengawasan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Tamu Pejabat, Kegiatan Pemeliharaan

Trantibum di Provinsi Banten, Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Kegiatan Pendataan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, dan Kegiatan Fasilitasi Satuan Linmas. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

3). Program Penanggulangan Bencana.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pencegahan dan penyebarluasan informasi peringatan dini bencana, Kegiatan Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, Kegiatan Fasilitasi penanganan kedaruratan bencana, Kegiatan Fasilitas Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan, Kegiatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana, dan Kegiatan Pemulihan Kondisi Sarana Prasarana Lokasi Pasca Bencana. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

4). Program Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi Banten dengan melaksanakan 6 kegiatan, yaitu: Kegiatan Penatausahaan Aset Daerah, Kegiatan Pemanfaatan dan Investasi Kekayaan Daerah, Kegiatan Penyelesaian TPTGR dan Penghapusan Barang Daerah, Kegiatan Pendistribusian dan Pemanfaatan Aset Daerah, Kegiatan Perencanaan Program dan Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan, dan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 40,82%.

5). Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 28 kegiatan, yaitu : Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah, Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi Dana Perimbangan, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serang, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cikande,

Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cilegon, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Pandeglang, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Rangkasbitung, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Malingping, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serpong, Kegiatan Ciputat, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Ciledug, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cikokol, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Balaraja, Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA 2013, Kegiatan Pembinaan dan bagi Hasil pajak kabupaten-Kota, Kegiatan Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah, Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2012 dan Interim Tahun 2013 Provinsi Banten, Kegiatan Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab-Kota Se-Provinsi Banten dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten TA.2012, Kegiatan Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA, Kegiatan Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah, Kegiatan Penyusunan Pedoman Anggaran, Kegiatan Penyusunan Raperda dan Rapergub P-APBD 2013 dan APBD 2014, Kegiatan Verifikasi dokumen pelaksanaan dan pergeseran anggaran, Kegiatan Evaluasi Raperda Kab-Kota dan Raper KDH Perubahan APBD TA 2013 dan APBD TA 2014, Kegiatan Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kegiatan Bina Pengendalian Keuangan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Sistem dan Standarisasi Kualitas Pelayanan, dan Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 87,73%.

- 6). Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi Provinsi Banten dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Kegiatan Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah

dan Pembinaan dan Fasilitasi Raperda-Perda OPD Kab-Kota, Kegiatan Penyusunan Kebijakan Ketatalaksanaan, Kegiatan Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah, Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural, Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Kegiatan Penyusunan LAKIP Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

- 7). Program Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan Kasus Disiplin PNS Provinsi Banten, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan Pembinaan Mental Pegawai, Kegiatan Penataan, Penempatan Kerja Pegawai dan Fasilitasi Persiapan PNS Masa Purna Tugas, Kegiatan Fasilitasi Kepangkatan dan Penggajian, Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional dan Sidang Baperjakat, Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS Provinsi Banten, Kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), Kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian, dan Kegiatan Peningkatan Manajemen Penatausahaan Kepegawaian. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 75,38%.

- 8). Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengembangan Program dan Kerjasama Kelembagaan, Kegiatan Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Aparatur, Kegiatan Diklat Kapabilitas Kepemimpinan Bagi Kepala Desa Se-Provinsi Banten, Kegiatan Diklat Struktural Bagi PNS Daerah, Kegiatan Diklat Teknis Penatausahaan Program, Kegiatan Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja, Kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur, Kegiatan Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah Daerah, dan Kegiatan Diklat Prajabatan Bagi Calon PNS

Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 80,22%.

- 9). Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (42 SKPD) dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kegiatan Pengelolaan Verifikasi dan Pembukuan Keuangan, Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten, dan Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Biro Umum Setda Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,00%.

- 10). Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh 37 SKPD dilingkungan Provinsi Banten dengan melaksanakan 57 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, Kegiatan Koordinasi Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah, Kegiatan Operasional Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (BPPK) dan Instalasi BPPK, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Budidaya Ikan Air Tawar, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Budidaya Ikan Pantai, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelabuhan Perikanan Pantai, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai

Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Budidaya Ikan Pantai, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelabuhan Perikanan Pantai, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciledug, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciputat, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serang, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang, Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serpong, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikokol, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cilegon, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Balaraja, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Malingping, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serang, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Daerah Rangkasbitung, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serpong, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikokol, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cilegon, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Balaraja, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cileduk, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciputat, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Malingping, Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Tugas Anggota, Kegiatan Bina Potensi Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pelayanan Aparatur DPPKD Provinsi Banten, Kegiatan Penataan Arsip di DPPKD Provinsi Banten, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten, Kegiatan Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda Provinsi Banten, Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanditel, Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pimpinan Daerah, Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pimpinan Sekretariat Daerah, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Gubernur Banten, Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan Setda Provinsi Banten, Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Dinas pada Setda Provinsi Banten, Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Lingkungan Setda Provinsi Banten, Kegiatan Penyelenggaraan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Pimpinan Daerah, Kegiatan Optimalisasi Pelayanan

Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di Lingkungan Setda, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Setda Provinsi Banten, dan Kegiatan Koordinasi Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 85,66%. Tidak tercapai target karena terdapat efisiensi pada beberapa kegiatan.

11). Program Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Kantor Inspektorat Provinsi Banten dengan melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan, Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif, Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, Kegiatan Penanganan Kasus-Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH, dan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,38%.

12). Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu: Kegiatan Fasilitasi Pengkajian Produk Hukum, Kegiatan Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten, Kegiatan Pelayanan Informasi Hukum dan Perpustakaan DPRD Provinsi Banten, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten, Kegiatan Fasilitasi Rapat Konsultasi dan Koordinasi Alat Kelengkapan DPRD, Kegiatan Fasilitasi Risalah DPRD Provinsi Banten, Kegiatan Fasilitasi Protokol DPRD Provinsi Banten, Kegiatan Fasilitasi Informasi dan Publikasi DPRD Provinsi Banten, dan Kegiatan Fasilitasi Aspirasi Masyarakat. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 83,35%.

- 13). Program Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Kegiatan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten, Kegiatan Penyusunan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Banten, Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab-Kota Wilayah I, Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab-Kota Wilayah II, Kegiatan Penyusunan Kajian Produk Hukum dan Penyusunan Perjanjian, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum, Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanganan Permasalahan Perlindungan Hukum & HAM, dan Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat/Kadarkum. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 90,77%.

- 14). Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis Daerah dan IPTEK.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM, Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian Bidang Sosial Budaya, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemasyarakatan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan, dan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Provinsi Banten pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yaitu :

a. Permasalahan dan Solusi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Provinsi Banten.

a) Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, kesinkronisasian antara perencanaan dengan hasil yang dicapai tentunya tidak selalu berjalan dengan mudah dan tepat. Kendala atau hambatan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Koordinasi yang belum optimal,
- Belum optimalnya fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten yang mempunyai kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- Koordinasi yang belum optimal antar Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Hal ini disebabkan euphoria otonomi daerah yang masih lekat, sehingga masih ada “batas” antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang seharusnya saling bersinergis,
- Belum terselenggaranya kerjasama dalam pemeliharaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan mitra kerja, instansi terkait dan masyarakat/tokoh masyarakat.

b) Solusi

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan mengamankan peraturan-peraturan kepal daerah adalah dengan melakukan pemantapan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, peningkatan sumber daya organisasi dan manajemen serta Peningkatan dan pengembangan operasional, koordinasi dan kerjasama pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan

Keputusan Kepala Daerah. Hal ini dapat ditempuh melalui penetapan kebijakan sebagai berikut :

- Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten,
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten,
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten,
- Menyusun basis data, rencana, monitoring dan evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- Mengembangkan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Provinsi Perbatasan, Kepolisian Daerah, PPNS, Instansi terkait dan masyarakat.

b. Permasalahan dan Solusi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten

a) Permasalahan

Dalam bidang penanggulangan bencana terutama di Provinsi Banten, pengurangan Risiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan daerah meskipun Provinsi Banten masih memiliki banyak wilayah yang rentan bencana. Salah satu isu yang dihadapi adalah kinerja yang belum optimal serta sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsive ke pendekatan yang preventif.

Penanggulangan bencana juga masih bersifat sektoral dan kondisional , sehingga perlu adanya sinkronisasi program dan kegiatan terkait pengurangan Risiko bencana. Secara umum dapat di katakan bahwa pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan di Provinsi Banten belum siap dalam

menghadapi bencana, sehingga setiap bencana dapat mengakibatkan tingginya jumlah korban maupun kerugian material.

Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang besar. Upaya pemulihan pasca bencana juga belum maksimal, dimulai dari data awal tentang jumlah korban, kerusakan infrastruktur sarana sosial dan lain-lain masih simpang siur berbeda satu dan lainnya, hal ini akan menyebabkan kelambatan dalam penanganan tindak lanjut bencana. Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat yang mumpuni. Laporan kejadian bencana yang masih belum mutakhir, sehingga menyulitkan proses tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana.

Selain itu yang perlu mendapat perhatian juga adalah orientasi/cara pandang para pemangku kepentingan, umumnya masih terarah pada penanganan ke daruratan belum pada aspek pencegahan dan penanganan Risiko bencana, kita berharap kedepan perlu adanya pemahaman dan kesadaran bahwa Risiko bencana dapat di kurangi melalui intervensi pembangunan oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya isu lain dalam penanggulangan bencana adalah masih dominannya peran pemerintah dan peranan luar komunitas dibanding dengan peranan tim siaga bencana dari dalam komunitas sendiri.

Kemudian isu lain yang tidak kalah pentingnya adalah belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang penanggulangan bencana , perencanaan yang komprehensif dalam penanganan bencana maupun isu gender dan kelompok-kelompok marjinal yang sangat rentan ketika terjadi bencana.

Tantangan dan Peluang

Dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 yang memiliki tugas antara lain :

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB.
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.

Semakin disadari dampak dari kejadian bencana serta meningkatnya kuantitas kejadian bencana dari tahun ke tahun membuat penanggulangan bencana menjadi perhatian dalam rencana pembangunan. Kelembagaan ini masih sangat muda/baru termasuk BPBD di Kabupaten/Kota, namun diharapkan Badan Penanggulangan Bencana menjadi SKPD sentral dalam upaya penanggulangan bencana.

Semakin meningkatnya kuantitas bencana maka akan meningkatkan kompleksitasnya permasalahan dalam pembangunan. Oleh karena itu, Upaya penanggulangan bencana juga harus ditingkatkan dengan upaya pendekatan yang strategis.

Tantangannya saat ini adalah mensosialisasikan paradigma baru merubah pendekatan responsive menjadi preventif untuk mengurangi korban dan kerugian akibat bencana agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap kebencanaan sampai ke tingkat paling bawah. “Pengurangan Risiko Bencana“ perlu terus di dorong agar para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan serta para pelaksananya memahami bagaimana paradigma baru dan memahami mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif, efisien dan handal.

Tantangan berikutnya adalah besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Jumlah penduduk yang banyak akan membawa konsekuensi ketersediaan dukungan, baik alat maupun dana yang besar pula. Disamping itu kearifan lokal yang harus dibangun pada komunitas-komunitas tertentu merupakan tantangan lain yang tidak kalah pentingnya. peluang nampaknya cukup memadai yaitu dengan adanya perhatian yang semakin besar baik di pemerintah maupun masyarakat akan perlunya kesadaran dalam hal pengurangan Risiko bencana, termasuk perhatian Dunia Internasional terhadap masalah ini. Yang penting adalah komitmen para pemangku kepentingan baik pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat menyadari bahwa hal ini menjadi tanggung jawab bersama.

b) Solusi

Perlu adanya penyusunan prioritas penanganan masalah kebencanaan yang spesifik di masing-masing kabupaten/kota untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program :

- 1). Membangun dan meningkatkan koordinasi yang efektif antara provinsi dengan kabupaten/kota baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program secara berkelanjutan,
- 2). Perlu disusun mekanisme pengendalian program antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan hasil atau capaian kinerja pelaksanaan program pembangunan,
- 3). Perlu peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan dan upaya lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur BPBD bidang kebencanaan serta pemenuhan kebutuhan staf pegawai secara struktural dan fungsional.
- 4). Perlu adanya Reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada

pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja yang dilaksanakan.

- 5). Menetapkan pedoman penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB.
 - 6). Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 7). Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
 - 8). Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- c. Permasalahan dan Solusi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten
- a) Permasalahan

Seperti telah dinyatakan di atas bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2013 ini tidak ditemui kendala atau masalah yang signifikan. Masalah yang sering dihadapi adalah pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dimana masih dijumpainya keterlambatan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyampaikan laporan kegiatan dan masih adanya perbedaan data di bidang-bidang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Adapun hal lain yang menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten antara lain, adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada APBD Perubahan TA. 2013, waktu pelaksanaan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan proses Lelang, adanya pengunduran diri penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan belanja barang pada akhirnya barang yang dibutuhkan sudah out of stock/discontinue atau indent, adanya keterlambatan penyampaian evaluasi Raperda dan Raper KDH Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota kepada Provinsi,

dan juga penyampaian evaluasi APBD Kab/Kota ke Provinsi melebihi batas waktu tahun anggaran, untuk penyampaian laporan akhir tahun, khususnya kegiatan yang dilaksanakan Provinsi Banten belum menyediakan data dalam bentuk elektronik untuk di akses melalui sistem informasi sesuai permintaan BPK-RI, hal ini memberikan dampak kepada efektifitas pelayanan informasi dan pembuatan laporan.

b) Solusi

Solusi dari permasalahan tersebut di atas antara lain :

- Agar terus ditingkatkan kedisiplinan para PPTK dalam menyampaikan progres kegiatan.
- Koordinasi intensif antar bidang dan institusi terkait terus diperkuat.
- Perlunya penataan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, misalnya pembangunan jaringan LAN (Local Area Network) di internal DPPKD.

Secepatnya merealisasi program sistem yang menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Daerah dengan sistem online realisasi dan laporannya, agar proses penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran dapat mudah di proses dan di akses oleh khususnya Sub bagian Program, Evaluasi Pelaporan dan Sub Bagian Keuangan.

d. Permasalahan dan Solusi pada Biro Organisasi Provinsi Banten

Dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Banten pada Tahun 2013 secara keseluruhan tidak ada permasalahan yang signifikan dilihat dari sisi pengelolaan anggaran/belanja daerah.

e. Permasalahan dan Solusi pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten

a) Bidang Mutasi

Penempatan PNS Dalam Jabatan Berbasis Kompetensi Dan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur utama memiliki peran yang penting dalam

menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Guna memacu PNS sebagai aparatur Negara untuk mencapai kinerja dan prestasi kerja serta kualitas kerja yang optimal perlu adanya pembinaan PNS melalui system pengembangan karir pegawai yang berbasis kompetensi. Belum adanya pola karir pegawai yang menjamin kepastian masa depan karir pegawai. Untuk itu perlu disusun standar kompetensi jabatan dan pola karir pegawai yang diharapkan dapat mempermudah dalam proses pengangkatan jabatan yang tepat, cepat, transparan dan praktis sesuai dengan keahliannya.

Peningkatan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala dan lain-lain perlu didukung oleh pelaksana bidang kepegawaian di masing masing satuan kerja, karena proses kenaikan pangkat dan gaji berkala selalu mengalami keterlambatan dalam hal pemberkasan, hal ini membuat pengurusan berkas ke BKN menjadi terhambat.

b) Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur

1). Pengembangan Sumber Daya Aparatur.

Salah satu faktor penunjang utama dalam keberhasilan dan pencapaian kinerja sebuah organisasi pemerintah. Kualitas dan juga kuantitas sumber daya aparatur yang memadai memiliki keterhubungan dengan produktivitas organisasi instansi pemerintah perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, tuntutan kebutuhan layanan publik serta standar kualifikasi pegawai secara normal.

2). Rekrutment/Seleksi dan Perencanaan Pegawai Berbasis Kompetensi.

Kebutuhan pegawai di indentifikasikan untuk saat ini dan masa yang akan datang dengan melakukan proyeksi kebutuhan pegawai yang sejalan dengan arah pengembangan organisasi, perkembangan IPTEK, perubahan peran dan fungsi organisasi

pemerintah maupun tuntutan masyarakat kearah pelayanan yang lebih baik. Selain itu dilakukan identifikasi jumlah dan kualifikasi PNS yang memasuki usia pensiun pada setiap jabatan dalam organisasi yang kemudian teridentifikasi kebutuhan yang akan dibandingkan dengan ketersediaan SDM dalam organisasi (bezzeting) baik dari aspek jumlah, kualifikasi, komposisi serta penyebaran pada setiap organisasi.

c) Bidang Sekretariat

Pengelolaan kinerja pegawai meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja. Perencanaan kinerja setiap pegawai yang ada dalam organisasi, yang merupakan pejabaran tugas pokok dan fungsi dalam bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap pegawai yang jelas serta memiliki kontribusi dan keterkaitan langsung untuk pencapaian tujuan organisasi. Hal ini diperlukan beberapa hal sebagai berikut:

- Setiap pegawai harus memiliki tugas yang jelas,
- Setiap pekerjaan harus menghasilkan output yang dirumuskan secara jelas berupa : barang, jasa/layanan informasi,
- Setiap hasil kerja dirumuskan ukuran keberhasilannya (kualitas, kuantitas, waktu dan biaya.

d) Bidang Disiplin Dan Kesejahteraan Pegawai

Dalam menjalankan tugasnya, aparatur selain dituntut untuk handal, professional, kreatif dan inovatif juga harus memiliki disiplin yang tinggi. Untuk itu perlu terus diupayakan kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan disiplin.

Salah satu sarana peningkatan disiplin adalah reward dan punishment. Pemberian reward dapat dilakukan dengan memberikan pujian, kenaikan pangkat pilihan,

promosi, penghargaan lainnya guna meningkatkan motivasi kerja pegawai.

Punishment berupa teguran lisan, pernyataan tidak puas, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan hingga pemberhentian PNS merupakan media peningkatan disiplin pegawai agar mentaati aturan yang berlaku. Reward dan Punishment diberikan dengan ukuran yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten untuk mendorong peningkatan kinerja dan disiplin pegawai.

e) Bidang Data dan Informasi

Data dan informasi kepegawaian perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang lebih baik, kurangnya dukungan sarana tersebut aparaturnya dalam mengakses data atau informasi masih bersifat manual, hal ini perlu didukung oleh kesiapan layanan informasi yang cepat, tepat dan terintegrasi keseluruhan SKPD.

f. Permasalahan dan Solusi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten.

a) Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan diklat tahun 2013 yaitu :

- 1). Kurangnya Apresiasi SKPD untuk mengikuti Diklat,
- 2). Kurangnya Angka Partisipasi Peserta Diklat,
- 3). Kurangnya SDM (Pegawai di Badan Diklat),
- 4). Intensitas Diklat selama 1 Tahun yang cukup tinggi belum dapat di Akomodir oleh fasilitas Diklat (Kurangnya Ruang Kelas Belajar dan Asrama),
- 5). ROK belum dapat di laksanakan Tepat waktu
- 6). Pengiriman Peserta Diklat tidak sesuai dengan Permintaan,
- 7). Pelaksanaan Pelatihan kurang hari atau berkurang

b) Solusi

Upaya mengatasi permasalahan ini antara lain :

- 1). Di harapkan ada teguran dari BKD untuk Intansi yang tak mengirimkan Peserta solusi yang di lakukan melaksanakan Diklat dengan Peserta seadanya,
- 2). Solusinya tidak dilaksanakanya kegiatan yang sesuai dengan Perencanaan.
- 3). Mohon tambahan Pegawai Solusi yang dilakukan melibatkan tenaga Honor yang ada.
- 4). Solusi yang dilakukan menunggu kegiatan yang lain selesai sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ROK.
- 5). Solusi yang dilakukan menunggu kegiatan yang lain selesai sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ROK
- 6). Solusi yang di laksanakan dengan peserta apa adanya.
- 7). Solusi yang dilakukan kegiatan tetap di laksanakan bergantian dengan kegiatan yang lain karna kurangnya Ruang kelas belajar dan Asrama.

g. Permasalahan dan Solusi pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten.

a) Permasalahan

Meskipun prosentase capaian akhir realisasi anggaran baik, namun ada beberapa kegiatan kurang maksimal dalam penyerapan realisasi anggaran sehingga terlihat ketidaktepatan dalam nilai efektifitas anggaran kegiatan tersebut. Hal ini mengindikasikan masih kurang tepatnya dalam pengalokasian anggaran kegiatan.

b) Solusi

Perlu ditingkatkan peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan kegiatan di tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

h. Permasalahan dan Solusi pada Biro Hukum Provinsi Banten.

a) Permasalahan

Program dan kegiatan pada Biro Hukum yang berada dibawah target ada 2 kegiatan yaitu kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum, yaitu :

- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah target kinerja secara keseluruhan tercapai pada tahun anggaran 2013, tetapi realisasi keuangan hanya tercapai 83,73% karena pada indikator kinerja Perumusan Raperda di tingkat Pansus (Raperda IX) dan Penyusunan Identifikasi Legal Drafter Raperda (VI) telah dilaksanakan hanya menunggu pengesahannya pada tahun 2014 sehingga tidak dapat meyerap anggaran yang ada.
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum target kinerja yang tidak sesuai dengan target ada pada indikator kinerja Pemberian Bantuan Hukum pada Masyarakat Miskin karena belum ada Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Sedangkan indikator kinerja dalam penyusunan kajian naskah akademik bantuan hukum telah memenuhi target kinerja secara keseluruhan.

b) Solusi

- Solusi yang ada yaitu indikator kinerja yang belum tercapai baik kinerja dan keuangan akan di anggarkan atau direncanakan pada tahun berikutnya.

i. Permasalahan dan Solusi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten.

a) Permasalahan

Dalam pelaksanaan rencana dan realisasi anggaran program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Banten sampai dengan triwulan IV Desember tahun 2012 terdapat beberapa permasalahan atau kendala, baik yang bersifat teknis

maupun secara administrasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Belum maksimalnya dukungan sumberdaya aparatur yang kompeten dan berkualitas serta sarana dan prasarana kerja aparatur yang belum memadai dalam rangka memberikan kontribusi aktif terhadap kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Balitbangda Provinsi Banten.
- Belum tersedia acuan yang tepat untuk standar operasional pelayanan dan ketetapan kinerja sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan dan indikator capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya Balitbangda Provinsi Banten.
- Masih lemahnya koordinasi, baik dalam rangka perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Balitbangda Provinsi Banten, sehingga hasil dari kegiatan tersebut masih belum tepat waktu.
- Masih kurangnya koordinasi antar peneliti dilingkungan Balitbangda Provinsi Banten dan masih belum tersedianya acuan/pedoman serta tim ahli sebagai alat dalam rangka keterarahan serta akan berfungsi/bermanfatnya hasil penelitian/kajian sebagai bahan perumusan kebijakan pengembangan daerah serta informasi teknologi terapan untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Belum tersedia data dan informasi yang akurat sebagai bahan rencana pelaksanaan penelitian/kajian hasil pelaksanaan penelitian.

b) Solusi

Peran penelitian dan pengembangan daerah sehingga menghasilkan suatu rumusan kebijakan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat relevan karena penelitian yang selama ini dilaksanakan sudah melalui berbagai tahapan dan memenuhi syarat akademis, sehingga menjadi hal yang wajar apabila seluruh elemen

pembangunan dapat memperhatikan hasil-hasil penelitian tersebut.

Pelaksanaan pembangunan pada Balitbangda Provinsi Banten sebagaimana diuraikan dalam laporan ini dikategorikan baik, namun kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu peningkatan dan dapat memberikan informasi tentang gambaran umum capaian kinerja kegiatan dibidang penelitian dan pengembangan daerah sehingga dapat menunjukan salah satu bentuk transparansi dalam hal pertanggung jawaban pelaksanaan rencana kegiatan sebagai instansi pemerintah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, beberapa hal yang perlu peningkatan diantaranya adalah:

- Perlu adanya peneliti secara fungsional yang menjadi mitra kerja Balitbangda Provinsi Banten, yang dapat melaksanakan berbagai penelitian di Provinsi Banten,
- Perlu meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Balitbangda Provinsi Banten guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pembangunan,
- Perlu adanya komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah,
- Peningkatan peran lembaga-lembaga penelitian guna percepatan pembangunan dan inovasi daerah.

Oleh karena itu, Balitbangda Provinsi Banten mengharapkan adanya koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga penelitian maupun instansi pemerintahan dan stakeholder lainnya agar penelitian dan pengembangan ini menjadi sumber informasi yang cukup berharga guna percepatan pembangunan Provinsi Banten dimasa yang akan datang.

20. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh 1 Program, yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Kegiatan

Pengembangan dan Pembangunan Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Penumbuh kembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan, Kegiatan Peningkatan kapasitas pemerintahan Desa-Kelurahan dalam perkembangan desa-kelurahan, dan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan Desa. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

21. Urusan Wajib Sosial.

Pada Urusan Wajib Sosial didukung oleh 4 program yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, dan Dinas Sosial Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah :

1) Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, dan Dinas Sosial Provinsi Banten dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskin, Kegiatan Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan, Kegiatan Penguatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

2) Program Rehabilitasi Sosial.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : Kegiatan Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia, Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Eks Napza, Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Org Dengan Kecacatan dan Eks Penyakit Kronis, Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial pada BPS, Kegiatan Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran pada BPS, Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada BP2S, dan Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran pada BP2S.

Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten dengan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan Perlindungan Sosial KTK dan Pekerja Migran Bermasalah, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana, dan Kegiatan Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, dan Dinas Sosial Provinsi Banten dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan Kualitas Potensi dan Sumber Kesos Masyarakat, Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3), Kegiatan Promosi, Publikasi dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kehidupan Keagamaan, dan Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pembinaan Lembaga Keagamaan, dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Provinsi Banten pada Urusan Wajib Sosial, yaitu :

1) Permasalahan dan Solusi pada Dinas Sosial Provinsi Banten.

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi Banten, meliputi :

- a) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi dan pembangunan

- b) Permasalahan sosial yang cukup kompleks belum didukung oleh SDM bidang kesos yang memadai, baik secara Kualitas maupun kuantitas.
 - c) Keterpaduan program dan kegiatan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota belum optimal.
 - d) Masih belum optimalnya peran serta *stakeholder*, dunia usaha atau komponen masyarakat lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - e) Ketersediaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum berdasarkan *by name by adress*.
- b. Solusi
- a) Perlu adanya penyusunan prioritas penanganan masalah kesejahteraan sosial yang spesifik di masing-masing Kabupaten/Kota untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.
 - b) Perlu peningkatan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan atau bimbingan teknis bidang sosial, serta pemenuhan kebutuhan staf pegawai secara struktural.
 - c) Membangun dan meningkatkan koordinasi yang efektif antara Provinsi dengan Kabupaten/kota, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program secara berkelanjutan.
 - d) Perlu disusun mekanisme pengendalian program antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan hasil atau capaian kinerja pelaksanaan program pembangunan dibidang kesejahteraan sosial.
 - e) Perlu adanya alokasi khusus untuk anggaran pendataan PMKS dan PSKS yang berdasarkan *by name by adress* di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

22. Urusan Wajib Kebudayaan.

Pada Urusan Wajib Kebudayaan didukung oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya. Pada program ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah, Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran Seni, Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah, Kegiatan Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan, dan Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan. Realisasi fisik kegiatan kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%. Pelaksanaan urusan ini telah dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

23. Urusan Wajib Statistik.

Pada Urusan Wajib Statistik didukung oleh Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah. Pada program ini diimplementasikan melalui 42 kegiatan Penyediaan Data yang dilaksanakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 94,17%.

24. Urusan Wajib Kearsipan.

Pada Urusan Wajib Kearsipan didukung oleh Program Pembinaan Kearsipan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten. Pada program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penataan dan Pengembangan Kearsipan Daerah Provinsi Banten, Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Banten (SIKP), Kegiatan Pembinaan Aparatur Pengelola Kearsipan Daerah Provinsi Banten, dan Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Kurangnya fasilitas atau sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan,
- b. Jumlah tenaga fungsional arsiparis masih relative sedikit,
- c. Kesadaran akan arti pentingnya pengelolaan arsip yang baik dan benar masih harus ditingkatkan,
- d. Regulasi kearsipan masih harus dilengkapi.

2) Solusi

- a. Membangun gedung Depo Arsip dan melengkapi dengan fasilitas pendukungnya,
- b. Menambah jumlah tenaga fungsional arsiparis sesuai kebutuhan,
- c. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada semua pihak yang terkait,
- d. Membuat regulasi kearsipan (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur).

25. Urusan Wajib Perpustakaan.

Pada Urusan Wajib Perpustakaan didukung oleh 2 Program yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah :

1) Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca.

Pelaksanaan program ini melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan Kualitas layanan dan Kerjasama Perpustakaan, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat, Kegiatan Pengelolaan Bahan Deposit, otomasi Karya Cetak-Rekam dan Naskah Kuno Tentang Banten, Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan, dan Kegiatan Pengembangan Layanan dan Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

2) Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan.

Pelaksanaan program ini melaksanakan 1 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem

Pengelolaan Perpustakaan. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 100%.

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1). Jumlah koleksi bahan pustaka masih relative sedikit/kurang;
- 2). Masih relative rendahnya minat dan budaya gemar membaca masyarakat;
- 3). Pelayanan perpustakaan yang masih terbatas;
- 4). Masih sedikitnya tenaga fungsional pustakawan.

b. Solusi

- 1). Menambah jumlah koleksi bahan pustaka sesuai kebutuhan para pemustaka;
- 2). Meningkatkan upaya-upaya promosi perpustakaan dan promosi untuk meningkatkan minat dan budaya gemar membaca kepada semua kelompok masyarakat;
- 3). Meningkatkan profesionalisme baik dalam pengolahan bahan pustaka dan pelayanan perpustakaan, termasuk memperbanyak frekwensi pelayanan melalui Mobil Unit Perpustakaan Keliling,
- 4). Meningkatkan jumlah tenaga fungsional perpustakaan.

2.1.2. Penyelenggaraan Urusan Pilihan

1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan.

Pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan didukung oleh Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Pada program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut, Kegiatan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, Kegiatan Pengendalian Sumberdaya Perikanan, dan Kegiatan Penanganan Pelanggaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan umumnya bersifat pada terbatasnya koordinasi dengan Kabupaten dan Kota, sehingga pelaksanaan kegiatan agak tersendat, tetapi lambat laun permasalahan itu dapat diatasi dengan komunikasi yang intens dengan staf atau bagian yang menanganinya secara langsung.
- b. Permasalahan yang sampai dengan batas akhir tahun tidak bisa diselesaikan adalah pelaksanaan beberapa tolok ukur yang ada, hal ini lebih disebabkan pada non teknis, yaitu anggaran yang tersedia di Dokumen Anggaran tidak cukup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dikarenakan adanya perubahan harga yang cukup signifikan.

2) Solusi

Keterlambatan pekerjaan dapat diantisipasi, dengan dilaksanakannya percepatan terutama pada beberapa kegiatan. Percepatan terutama dilaksanakan dibidang realisasi anggaran, kinerja keuangan dinilai sangat lambat, terkait dengan penggunaan sistem pengelolaan yang baru.

2. Urusan Pilihan Pertanian.

Pada Urusan Pilihan Pertanian didukung oleh 4 program yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah :

- 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.

Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 33 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan Daya Dukung Pembangunan Perkebunan, Kegiatan Pengembangan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan, Kegiatan Perlindungan Tanaman Perkebunan, Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman, Kegiatan Pengembangan Benih Unggul

Bermutu, Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Serealia, Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Aneka Kacang dan Umbi (Akabi), Kegiatan Pengendalian Mutu Benih Tanaman Hortikultura, Kegiatan Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Kegiatan Pengendalian Mutu Benih Tanaman Pangan, Kegiatan Pengembangan Varietas tanaman Pangan dan Hortikultura, Kegiatan Pengembangan Ternak Besar, Kecil Dan Unggas, Kegiatan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular, Kegiatan Pengembangan Produksi Dan Pemanfaatan Benih Bibit Unggul, Kegiatan Pengembangan Perbibitan Ternak Ruminansia, Kegiatan Pengembangan Perbibitan Ternak Non Ruminansia, Kegiatan Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular, Kegiatan Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pelayanan Masyarakat Veteriner (kesmavet), Kegiatan Peningkatan Produksi Dan Pengembangan Komoditas Tanaman Buah Dan Biofarmaka, Kegiatan Peningkatan Produksi Dan Pengembangan Komoditas Tanaman Hias Dan Sayuran, Kegiatan Peningkatan Sistem Pengendalian Opt Hortikultura, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Laut, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar, Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar (BBAT), Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Tawar (BBAT), Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Laut (BBIP), Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Laut (BBIP), Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan dan Armada Perikanan, Kegiatan Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap, Kegiatan Pembinaan Tata Operasional Pelabuhan Perikanan (BPPP), Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Pelabuhan Perikanan (BPPP), dan Kegiatan Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (DAK). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

- 2) Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.

Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 13 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan Kebun, Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan Perkebunan, Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu, Kegiatan Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Pangan, Kegiatan Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman Hortikultura, Kegiatan Penyediaan Teknologi Pasca Panen Peternakan, Kegiatan Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan, Kegiatan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan, Kegiatan Pengembangan Bisnis dan Investasi, Kegiatan Pengelolaan Kompetensi dan Pelayanan Pengujian UPTD BPMHP Banten, dan Kegiatan Pengendalian Mutu dan Perekayasaan Olahan Hasil Perikanan (BPMHP). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

- 3) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.

Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pemberdayaan kelompok tani, Kegiatan Pemberdayaan Petani Dan Kelembagaan Pertanian, Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan, Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Kehutanan dan Perkebunan, Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Perhatian, Perikanan dan Kehutanan, dan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya dan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

- 4) Program Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten dengan melaksanakan 1 kegiatan,

yaitu : Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Sarana Produksi Pertanian. Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 100%.

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten.

a. Permasalahan

a) Permasalahan pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan terhadap Produksi dan produktivitas komoditas perkebunan masih ada di bawah rata-rata produksi dan produktivitas nasional, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

- Sistem pengusahaan budidaya tanaman perkebunan yang dilakukan oleh petani cenderung terpisah-pisah dalam lokasi yang berjauhan berupa spot-spot yang tidak kompak sehingga menyulitkan dalam pembinaan maupun secara finansial kurang ekonomis berkaitan dengan jarak, dan sarana budidaya yang sulit untuk dimobilisir.
- Pelaksanaan pembangunan perkebunan sangat dipengaruhi oleh musim. Kegiatan penanaman hanya bisa dilaksanakan dengan baik pada musim hujan, sehingga pelaksanaan kegiatan sering menghadapi kendala sempitnya waktu yang dimiliki untuk melakukan kegiatan penanaman.
- Penguasaan lahan oleh petani dengan luasan yang sedikit, mengakibatkan sulitnya melakukan kegiatan produksi secara ekonomis karena terlalu kecilnya skala ekonomi.

b) Permasalahan pada Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan terhadap Pemasaran produk kehutanan dan perkebunan akan menghadapi persaingan yang semakin sulit, karena sudah mulai akan diberlakukan syarat-syarat tertentu terkait

produk tersebut, contoh untuk produk pertanian (perkebunan) akan diterapkan produk yang sudah mempunyai SNI (Standar Nasional Indonesia). Begitu juga untuk produk kehutanan berupa kayu harus sudah mempunyai SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu), jadi untuk ke depannya hanya kayu-kayu yang berasal dari hutan rakyat yang sudah bersertifikat saja yang bisa di jual.

- c) Permasalahan pada Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan yaitu jumlah kelompok tani kehutanan dan perkebunan yang sudah terdaftar pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten adalah 898 kelompok, dari jumlah tersebut sebanyak kurang lebih 54,6% (488 kelompok) masih ada di tingkat pemula.

b. Solusi

- a) Solusi pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan terhadap Produksi dan produktivitas pada komoditas perkebunan :

➤ Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembinaan maupun skala ekonomi budidaya tanaman perkebunan maupun kehutanan, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten berusaha untuk membentuk suatu wilayah komoditas dalam suatu wilayah hamparan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan nilai ekonomi produk. Wilayah komoditas dilakukan dengan membentuk suatu wilayah perusahaan komoditas tertentu dari hulu sampai hilir. Dua komoditas yang sudah dimulai kegiatan pembentukan wilayahnya yaitu kakao melalui tolok ukur pembentukan kampung kakao dan akan

dilanjutkan dengan komoditas lainnya seperti aren melalui pembantuan lembur aren.

- Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi tanaman perkebunan ditingkatkan.

b) Solusi pada Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan terhadap Pemasaran produk kehutanan dan perkebunan akan menghadapi persaingan yang semakin sulit, meliputi :

- Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten sebagai regulator maupun fasilitator pembangunan kehutanan dan perkebunan terus ditingkatkan, dengan cara menciptakan iklim yang kondusif untuk masyarakat berusaha di bidang kehutanan dan perkebunan.
- Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan, sudah saatnya ditingkatkan pembangunan kerjasama dengan dunia luar untuk menggali potensi yang dimiliki oleh Provinsi Banten.
- Solusi pada Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan yaitu perlu ditingkatkan jumlah target sasaran kelompok tani yang dibina dan dibimbing yang semula masuk kelompok tani pemula, menjadi kelompok tani lanjut, madya atau utama.

2. Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten :

a. Permasalahan

- a) Rendahnya pengetahuan petani mengenai mekanisme pasar sehingga harga hasil panen cenderung fluktuatif.
- b) Belum optimalnya penggunaan lahan secara baik.

b. Solusi

Meningkatkan sumberdaya petani dan aparatur maupun pengusaha agar pembinaan maupun pengelolaan usaha

kehutanan dan perkebunan dapat dilaksanakan secara professional.

3. Urusan Pilihan Kehutanan.

Pada Urusan Pilihan Kehutanan didukung oleh Program Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kegiatan Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Hutan, Kegiatan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan, dan Kegiatan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Permasalahan tenurial (penguasaan lahan atau sumber daya oleh masyarakat) di dalam kawasan hutan tersebar hampir di seluruh wilayah Banten, dengan berbagai kasus yang berbeda, yaitu diantaranya :

- a. Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) Sertifikat di dalam kawasan hutan, reklamasi bekas tambang dan lahan kompensasi belum selesai
- b. Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) Lahan pengganti diokupasi oleh masyarakat
- c. Pemanfaatan Hutan Konservasi, dan Pemanfaatan illegal di kawasan konservasi
- d. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Hutan adat di dalam kawasan hutan

2) Solusi

Dilakukan pertemuan secara rutin, berkala dan serius yang melibatkan seluruh stakeholders yang terlibat dengan dikawal oleh Instansi terkait.

4. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pada Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral didukung oleh 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah :

- 1) Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Pelaksanaan Program ini melaksanakan 10 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten Lebak dan Pandeglang), Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP II (Kabupaten-Kota Serang dan Kota Cilegon), Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP I (Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan), Kegiatan Perencanaan Pembangunan Listrik Perdesaan, Kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik Perdesaan, Kegiatan Pengembangan Jaringan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten, Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan di Provinsi Banten, Kegiatan Perencanaan Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan di Provinsi Banten, Kegiatan Pengembangan Potensi dan Pembinaan Pengusahaan MIGAS, dan Kegiatan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

- 2) Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Pelaksanaan Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Teknik Pertambangan, Kegiatan Pemetaan dan Perencanaan Teknis Pengembangan Potensi Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi di Provinsi Banten, Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Pertambangan, Kegiatan Pemantauan dan Konservasi Potensi Air Tanah di Provinsi Banten, Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Potensi Air Tanah di Provinsi Banten, Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Data Mitigasi Geologi, dan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Air Tanah di Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

- 3) Program Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi.

Pelaksanaan Program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Bidang Pertambangan dan Energi, dan Kegiatan Promosi Potensi dan Produk serta Fasilitasi Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Adanya kegiatan usaha pertambangan yang tidak berijin berupa pertambangan rakyat serta kegiatan pertambangan yang berijin tetapi tidak menerapkan kaidah dan penanganan yang baik dan benar merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan.
- b. Salah satu permasalahan air tanah adalah terganggunya tatanan air tanah akibat adanya pengambilan air tanah yang tidak berijin sehingga mengakibatkan pengambilan air tanah yang debit dan volumenya melampaui kemampuan reservoir air tanah serta masih terdapatnya perusahaan/industri yang memiliki ijin pemanfaatan air tanah tetapi belum memasang meter air sehingga menyulitkan pengendalian pengambilan air tanah.
- c. Dengan terbitnya Undang-Undang no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa dampak berubahnya sistem pengelolaan usaha pertambangan di daerah, tetapi peraturan yang bersifat operasional penunjang sampai saat ini belum diterbitkan oleh pemerintah sehingga membawa implikasi pemerintah daerah belum dapat menerbitkan perijinan untuk kegiatan pertambangan baru yang berakibat menghambat investasi di daerah.
- d. Perencanaan penganggaran kegiatan yang belum sesuai dengan kebutuhan operasional pelaksanaan sebenarnya (berlebih/tidak sesuai kebutuhan/menyalahi JUKNIS), sehingga menyebabkan tidak terserapnya seluruh anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan tersebut.

2) Solusi

- a. Pembinaan terhadap para pengusaha pertambangan baik perusahaan maupun perorangan ;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengambilan air tanah serta menyusun kebijakan dan teknis dalam konservasi air tanah.

- c. Penyelenggaraan forum atau media untuk membahas serta mengambil sikap bersama terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul atau berkembang pada kegiatan pengawasan dan pengendalian di bidang pertambangan dan energi
- d. *Rescheduling* seluruh pelaksanaan kegiatan, sehingga seluruh sub kegiatan pada triwulan selanjutnya dapat melaksanakan kegiatannya masing-masing dengan lancar sesuai dengan target kinerja dan target waktu penyelesaian kegiatan yang telah ditetapkan.

5. Urusan Pilihan Pariwisata.

Pada Urusan Pilihan Pariwisata didukung oleh 2 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah :

1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata.

Pelaksanaan Program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata, Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pariwisata, Kegiatan Analisa Pasar Pariwisata, Kegiatan Promosi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif, dan Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 87,19%.

2) Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan.

Pelaksanaan Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata, Kegiatan Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata, dan Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayaan dan Pariwisata. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 87,81%.

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata terdapat beberapa kegiatan realisasi fisiknya kurang maksimal dari target yang telah ditetapkan yaitu :
 - a) Anggaran tolok ukur Revisi Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebesar Rp.

108.950.000 hanya digunakan/diserap sebesar Rp. 4.850.000,- (4,45%) alasan : Anggaran ini masuk pada anggaran perubahan tahun anggaran 2013, perencanaan awal pelaksanaan teknis telah disepakati dengan konsultan dari Jakarta (Sahid Universiti)

- b) namun pada tahap akhir pihak konsultan tidak bisa menjelaskan hasil pekerjaan, sehingga batas waktu pencairan LS dari kegiatan ini sudah terlewati jadi hal ini tidak bisa diserap karena pihak konsultan tidak bisa menyelesaikan hasil kajian tersebut diatas.
- c) Anggaran Tolok Ukur Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata sebesar Rp. 481.950.000 hanya digunakan/diserap sebesar Rp. 131.200.000,- (27,22%) alasan : Anggaran ini masuk pada anggaran perubahan tahun 2013 hal ini tidak bisa diserap karena tidak bisa dilaksanakannya rapat koordinasi Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang mengharuskan seluruh ketua dan anggota Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung harus hadir, namun pada saat itu Ibu Gubernur Banten karena keterbatasan waktu tidak bisa hadir sehingga rapat koordinasi tidak dapat dilaksanakan.
- b. Pada Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisata terdapat beberapa kegiatan realisasi fisiknya kurang maksimal dari target yang telah ditetapkan yaitu :
 - a) Fasilitasi Lembaga Budaya hanya dilaksanakan berdasarkan undangan yang masuk ke Dinas,
 - b) Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian dilaksanakan berdasarkan undangan.
- 2) Solusi
 - a) Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang lebih optimal terhadap beberapa kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran.
 - b) Anggaran yang tidak digunakan dalam pelaksanaan kegiatan di kembalikan kepada Kas Daerah.

6. Urusan Pilihan Industri.

Pada Urusan Pilihan Industri didukung oleh Program Peningkatan Daya Saing Industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengembangan Industri Transportasi Dan Telematika, Kegiatan Dukungan Pengembangan bagi Industri TPT dan Aneka, Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Mutu dan Kualitas Aneka produk IKM, Kegiatan Satandarisasi Dan Sertifikasi Industri, Kegiatan Pengembangan Desain dan Diverifikasi Komoditas Kerajinan Berbasis Budaya Daerah, Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Produk dan Keamanan Badan KPP Spesifik Daerah, Kegiatan Pengembangan sektor IKM Kimia Provinsi Banten, dan Kegiatan Peningkatan Dukungan Bagi Pembentukan dan Pengembangan Klaster Industri Mesin. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

7. Urusan Pilihan Perdagangan.

Pada Urusan Pilihan Perdagangan didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengawasan Barang Jasa beredar & Kebutuhan Pokok Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Peran Pelaku Usaha dalam Kerjasama Perdagangan, Kegiatan Peningkatan Akses Distribusi dan Bina Sarana Pasar bagi Komoditas Andalan Daerah, Kegiatan Peningkatan Promosi dan Pemanfaatan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri, Kegiatan Peningkatan Peran dan Fasilitasi Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah, Kegiatan Pengembangan Sentra Pemasaran dan Lelang Produk Andalan Daerah, Kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, dan Kegiatan Penerapan Teknologi Aplikasi dan Kalibrasi Alat Ukur. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 89,16%.

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Permasalahan yang masih dirasakan secara objektif dalam rangka pencapaian kinerja kegiatan sebagaimana yang diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2013 diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya jumlah sumberdaya aparatur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten memberikan pengaruh terhadap kelancaran dan keterarahan terhadap kinerja pelaksanaan Kegiatan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
- b. Tingkat kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara maksimal belum didukung dengan tingkat kemampuan aparat dan sarana prasarana yang memadai.

2) Solusi

Solusi yang merupakan rekomendasi dari permasalahan untuk pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
- b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

8. Urusan Pilihan Ketransmigrasian.

Pada Urusan Pilihan Ketransmigrasian didukung oleh Program Penyiapan, Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi, Kegiatan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi, dan Kegiatan Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 98,44%.

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Program transmigrasi yang selalu berubah setiap tahunnya mengikuti program dari pusat, sehingga ada kesulitan dalam penentuan target dan lokasi tujuan transmigrasi,
- b. Perubahan program transmigrasi dari pusat mengakibatkan berubahnya pula program transmigrasi Provinsi dan Kab/Kota, sehingga pada tahun 2013 ada 10 KK yang tidak terakomodir karena pusat hanya memberikan alokasi 60 KK

kepada Provinsi Banten dari yang sebelumnya di targetkan oleh Provinsi Banten sebanyak 70 KK,

- c. Tidak realistisnya biaya angkutan transmigrasi, sehingga memerlukan revisi biaya.
- d. Kurangnya jumlah dan mutu SDM/Aparatur Dinas.

2) Solusi

- a. Perlu adanya perencanaan yang matang baik tentang lokasi pelaksanaan, waktu pelaksanaan, serta pihak-pihak lain yang nantinya akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
- b. Perlunya menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan provinsi daerah penerima transmigran, sehingga pelaksanaan kegiatan transmigrasi dapat berjalan dengan semestinya.
- c. Terus melakukan koordinasi yang baik dengan pusat dan kab/kota agar dapat mengakomodir target yang ada di Provinsi Banten.
- d. Perlu juga adanya penambahan jumlah personel aparatur dinas agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional yang bersifat mandatory. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Isu penting dan masalah pembangunan daerah di Provinsi Banten tidak terlepas dari isu dan masalah nasional maupun isu eksternal lainnya.

2.3.1 Isu Penting dan Masalah Mendesak Nasional

Ekonomi Indonesia pada tahun 2013 tumbuh 5,8 persen (y-o-y), yang dipengaruhi oleh krisis utang pemerintah negara Uni Eropa dan perlambatan ekonomi dunia, namun pertumbuhan sebesar ini jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi negara lain. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,0 persen. Inflasi pada tahun 2013 (oktober) mencapai 8,32 persen, Jumlah penduduk miskin tahun 2013 (maret) 28,07 juta jiwa (11,37 persen), TPT tahun 2013 7,39 Juta Jiwa (6,25 persen), RLS tahun 2012 8,1 tahun, dan AMH tahun 2012 93,3 persen.

Tantangan pembangunan nasional meliputi dua, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan pembangunan nasional yang sifatnya internal terdiri dari :

1. Struktur perekonomian Indonesia masih belum kokoh dan rentan terhadap gejolak global. Hal ini disebabkan struktur industri manufaktur masih dangkal.
2. Pengetatan moneter dan fiskal memperlambat pertumbuhan ekonomi termasuk akan terjadi penurunan investasi dan penerimaan pajak.
3. Terjadinya perlambatan penurunan kemiskinan dan pengangguran
4. Kesenjangan antar kelompok masyarakat masih tinggi, koefisien gini: 0,41 (2012)

Sedangkan tantangan pembangunan nasional yang sifatnya eksternal terdiri dari :

1. Pemulihan ekonomi Amerika dan Eropa, akibatnya adalah:
2. Arus modal asing berbalik ke negara maju;
3. Berakhirnya siklus panjang harga komoditas tinggi sehingga mempersulit upaya pengurangan defisit transaksi berjalan.

Dalam RKP 2015, diidentifikasi 25 (dua puluh lima) isu strategis yang dikelompokkan menurut bidang-bidang pembangunan yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025 sebagai berikut:

Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Isu Strategis Pengendalian Jumlah Penduduk

- 1) Pelayanan KB kurang berkualitas dan belum terjangkau secara merata;

- 2) Pelaksanaan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi/KIE program KB dan kesehatan reproduksi/KR belum efektif;
- 3) Peningkatan pemahaman remaja mengenai kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga dalam rangka penyiapan kehidupan masih belum optimal; dan
- 4) Pembangunan keluarga melalui ketahanan dan pemberdayaan keluarga masih lemah, sehingga pembinaan dan pelestarian akseptor tidak optimal;
- 5) Meningkatnya jumlah peserta KB aktif menjadi sebanyak 29,72 juta akseptor;
- 6) Terlayannya peserta KB baru yang memberikan kontribusi terhadap peserta KB Aktif sebanyak 6,85 juta akseptor; dan
- 7) Meningkatnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) menjadi sebesar 20,5 persen dan menurunnya penggunaan kontrasepsi dengan metode jangka pendek dan ketidakberlangsungan (DO) pemakaian kontrasepsi sebesar 24,6 persen.

2. Isu Strategis Reformasi Pembangunan Kesehatan

- 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply)
 - a. Penyelesaian penyusunan dan harmonisasi peraturan,
 - b. Perluasan kepesertaan, termasuk proses pendaftaran dan pengumpulan iuran,
 - c. Integrasi jaminan sosial lainnya ke dalam JKN,
 - d. Kesiapan pelayanan kesehatan, termasuk distribusi dan sistem rujukan, dan
 - e. Menjaga kesinambungan finansial BPJS.
- 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
 - a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
 - b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak
 - c. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat dan Pencegahan Masalah Gizi dengan Fokus pada Ibu Hamil, Balita, Anak Sekolah, Remaja
 - d. Menurunnya Angka Kesakitan akibat Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi, Peningkatan Surveilans, Karantina Kesehatan, dan Kesehatan Matra

- e. Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas.

3. Isu Strategis Reformasi Pembangunan Pendidikan

- 1) Belum meratanya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh masih terdapatnya kesenjangan partisipasi pendidikan terutama antarkelompok sosial-ekonomi dan antarwilayah baik untuk pendidikan dasar dan menengah;
- 2) Masih belum memadainya kualitas pendidikan menengah, dan masih kurangnya relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja;
- 3) Masih rendahnya akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi serta masih kurang mampunya pendidikan tinggi dalam mengembangkan iptek melalui penelitian dasar dan terapan, serta melakukan inovasi dan intervensi;
- 4) Belum memadainya kompetensi dan profesionalisme pendidik; dan
- 5) Masih belum efisiennya pemanfaatan anggaran pendidikan dan tatakelola pendidikan.

4. Isu Strategis Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

- 1) Menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 9 – 10 persen;
- 2) Sasaran program perlindungan sosial pada tahun 2015 difokuskan pada peningkatan kesejahteraan sosial pada individu, rumah tangga, dan komunitas, terutama yang termasuk dalam penduduk miskin dan rentan
- 3) Sasaran terkait pemberdayaan UMK dan koperasi yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan di antaranya (1) pertumbuhan wirausaha baru, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi; dan (2) peningkatan proporsi UMK yang dapat mengakses layanan keuangan formal
- 4) Terciptanya konsolidasi program penanggulangan kemiskinan dengan menyempurnakan mekanisme pelaksanaan dan koordinasi antar Kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya.

5. Isu Strategis Transformasi Sektor Industri

Pada tahun 2015 industri pengolahan di targetkan tumbuh sebesar 5,5-6,0 persen, dengan demikian industri nonmigas ditargetkan tumbuh 6,2 persen.

6. Isu Strategis Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

- 1) Memfasilitasi seluruh elemen bangsa agar dapat berkompetisi dalam pasar tenaga kerja, sehingga pengusaha dan pekerja di seluruh segmen dapat mengisi peluang yang tersedia.
- 2) Meningkatkan jumlah dan rasio tenaga kerja yang kompeten dan profesional yang bisa beradaptasi dalam lingkungan kerja melalui langkah-langkah strategis untuk menjamin kualitas dan keahlian yang dilatihkan benar-benar tercermin pada pekerja.
- 3) Mempercepat perjanjian saling pengakuan atau mutual recognition arrangement (MRA) untuk sektor jasa yang di prioritaskan dalam MEA, dan belum memiliki MRA yaitu sektor transportasi udara, teknologi informasi dan komunikasi (e_asean), dan jasa logistik, serta 7 (tujuh) sektor industri/perdagangan yang juga disepakati namun belum memiliki MRA yaitu produk berbasis pertanian, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif, produk berbasis kayu.

7. Isu Strategis Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

- 1) Meningkatnya kontribusi UMKMK dalam perekonomian yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM sebesar 3,5%; pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam pembentukan PDB sebesar 6,0%; pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam ekspor non migas sebesar 4,8%; dan pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam investasi sebesar 8,4%.
- 2) Meningkatnya daya saing UMKM yang ditandai dengan pertumbuhan jumlah usaha kecil dan menengah sebesar 5,1%; pertumbuhan produktivitas UMKM 5,0%; pertambahan jumlah UMKM formal yaitu yang berbadan hukum, memiliki izin dan/atau terdaftar (pada tahun 2015 Kementerian Koperasi dan UKM baru akan melakukan registrasi usaha); proporsi UMKM yang mengakses layanan keuangan formal sebesar 18,0%; Proporsi UMKM yang menerapkan teknologi sebesar 25,0%; proporsi UMKM

yang menerapkan standarisasi mutu & sertifikasi produk sebesar 15,0%; dan proporsi UMKM yang tergabung dalam kemitraan/jaringan produksi dan pemasaran sebesar 12,3%.

- 3) Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif yang ditandai dengan proporsi wirausaha baru per jumlah penduduk usia produktif sebesar 1,7% dan pertumbuhan jumlah pelaku usaha di industri kreatif sebesar 11%.
- 4) Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi yang ditandai dengan pertumbuhan unit koperasi sebesar 6,0%; pertumbuhan anggota koperasi sebesar 7,0%; proporsi koperasi berkualitas sebesar 7,0%; rasio promosi ekonomi anggota di atas 10%; proporsi koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) sebesar 55,0%; dan pertumbuhan volume usaha koperasi sebesar 15,6%.

8. Isu Strategis Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi

- 1) Menurunkan rasio biaya logistik nasional terhadap PDB pada tahun 2015 menjadi sebesar 23,6 persen;
- 2) Menurunkan dwelling time menjadi 6 hari; serta
- 3) Menjaga koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah dan antar waktu pada kisaran 5-9 persen.

9. Isu Strategis Reformasi Keuangan Negara

- 1) Meningkatnya penerimaan negara yang meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai; serta
- 2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas belanja negara.

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

10. Isu Strategis Peningkatan Kapasitas Iptek

- 1) Meningkatnya kapasitas Iptek nasional sehingga mampu untuk mendukung:
 - a. peningkatan daya saing sektor produksi barang dan jasa;
 - b. keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta
 - c. penyiapan sosial budaya masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern.
- 2) Meningkatkan ketersediaan faktor input bagi kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang mencakup SDM, sarana prasarana, kelembagaan Iptek, jaringan, dan pembiayaannya.

11. Isu Strategis Peningkatan Ketahanan Air

- 1) Meningkatkan kapasitas tampung air sebesar 58,5 juta m³ akan dipenuhi dengan pembangunan waduk sebanyak 21 buah termasuk di Papua dan Maluku. Pembangunan 21 buah waduk tersebut selain dapat meningkatkan kapasitas tampung perkapita, juga akan meningkatkan keterjaminan sumber air irigasi dari waduk yang selama ini baru mencapai 11%, dan sebagai sumber air baku baik untuk rumah tangga, perkotaan dan industri, serta sebagai sumber tenaga listrik PLTA. Selain itu juga akan dilakukan pembangunan waduk skala kecil, embung, dan bendung gerak yang dibangun sebagai penampung air dalam kapasitas kecil dengan sasaran sebesar 195 buah.
- 2) Sasaran pembangunan irigasi baru yang ditargetkan untuk mendukung ketahanan pangan adalah 33,3 ribu hektar, yang difokuskan pada daerah di luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Sasaran pembangunan jaringan irigasi tersebut juga untuk mengkompensasi terjadinya alih fungsi lahan sawah yang rata-rata pertahun melebihi 50 ribu hektar. Untuk mendukung ketahanan pangan, selain pembangunan jaringan irigasi juga dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi sebesar 38,18 ribu hektar untuk mengurangi laju kerusakan yang terjadi. Selain itu jaringan rawa yang juga potensial sebagai lahan pertanian akan dilakukan pembangunan jaringan rawa baru dan rehabilitasi jaringan rawa dengan target masing-masing 10,16 ribu hektar dan 13,80 ribu hektar.

12. Isu Strategis Penguatan Konektivitas Nasional

- 1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah
Dalam rangka meningkatkan keseimbangan pembangunan antar wilayah, maka sasaran umum yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan kota-kota sesuai peran dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.
- 2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
Dalam rangka meningkatkan peran kota-kota di Indonesia sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, maka sasaran umum

yang ingin dicapai adalah mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) yang merupakan standar minimum untuk sebuah kota dalam menyediakan layanan bagi masyarakatnya, terutama pembangunan sarana dan prasarana transportasi kota-kota di luar Pulau Jawa.

3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan

Dalam rangka menyiapkan kota-kota metropolitan dan besarsebagai pintu terdepan yang akan menghadapi perdagangan bebas dan kerjasama perekonomian global, maka diperlukan percepatan pembangunan transportasi massal perkotaan. Sasaran umum yang ingin dicapai adalah : Peningkatan Mobilitas Perkotaan serta penurunan angka kemacetan melalui peningkatan pelayanan angkutan masal.

13. Isu Strategis Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar

1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional

Rasio elektrifikasi nasional saat ini masih relatif tergolong rendah, terutama di wilayah-wilayah timur Indonesia, yang mana sampai dengan tahun 2013 sekitar 80,51 persen dengan variasi yang berbeda-beda di berbagai wilayah, sementara itu pemanfaatan energi baru terbarukan/EBT belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi

Dalam rangka peningkatan akses air minum dan sanitasi, sasaran umum yang ingin dicapai adalah meningkatnya layanan air minum dan sanitasi layak baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan. Pada tahun 2015, akses penduduk terhadap air minum layak diharapkan dapat meningkat menjadi 70,25% pada tingkat kebutuhan dasar. Selain itu, akses penduduk terhadap fasilitas sanitasi layak juga diharapkan dapat meningkat menjadi 62,4% pada tingkat kebutuhan dasar.

3) Penataan Perumahan/Permukiman

Dalam rangka penataan perumahan dan kawasan permukiman, sasaran umum yang ingin dicapai adalah meningkatnya layanan perumahan bagi seluruh penduduk, terutama masyarakat

berpenghasilan rendah. Pada tahun 2015, angka backlog perumahan diharapkan dapat berkurang menjadi 11,5 juta rumah tangga. Selain itu, rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni juga diharapkan berkurang menjadi 3,26 juta rumah tangga.

Bidang Politik

14. Isu Strategis Konsolidasi Demokrasi

- 1) Menguatnya kelembagaan politik/demokrasi yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka Indeks Demokrasi Indonesia pada aspek Institusi Demokrasi;
- 2) Terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka Indeks Demokrasi Indonesia pada aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik;
- 3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;
- 4) Terjaganya stabilitas sosial dan politik;
- 5) Terjaganya stabilitas sosial politik dari ancaman terorisme.

Bidang Pertahanan dan Keamanan

15. Isu Strategis Percepatan Pembangunan MEF dan Alutsus Polri Dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan

Pada akhir tahun 2014, sejumlah peralatan modern akan mewarnai kelengkapan alutsista TNI. Pada posisi ini, daya penggentar militer Indonesia meningkat cukup signifikan dan semakin diperhitungkan oleh kekuatan militer asing. Konsekuensi dari peningkatan kekuatan militer tersebut adalah penyediaan anggaran pemeliharaan dan perawatan alutsistanya. Penyediaan anggaran ini dalam rangka menjaga dan/atau meningkatkan kesiapan operasionalnya.

16. Isu Strategis Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri

- 1) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
- 2) Menguatnya intelijen; dan Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba.

Bidang Hukum dan Aparatur

17. Isu Strategis Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik

- 1) Meningkatnya kualitas implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan: menguatnya kapasitas kelembagaan pemerintah, penguatan kelembagaan manajemen kinerja pembangunan, kelembagaan pembentukan regulasi;
- 2) Meningkatnya efektivitas transformasi kelembagaan dalam rangka peningkatan dan optimalisasi penerimaan pajak; meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi; meningkatnya kapasitas, profesionalisme dan kinerja ASN;
- 3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik; meningkatnya peranan *e-government* untuk mendukung bisnis proses manajemen birokrasi secara modern, akuntabel dan terpadu;
- 4) Meningkatnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan; meningkatnya efektivitas implementasi sistem manajemen kinerja pembangunan; dan
- 5) Peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

18. Isu Strategis Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sasaran utama pembangunan Bidang Hukum adalah terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif.

Bidang Wilayah Dan Tata Ruang

19. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan

- 1) Daerah Tertinggal
Pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk percepatan pengurangan kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju. Pengurangan kesenjangan ini difokuskan pada (1) Pengembangan kelembagaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, (2) Pemenuhan pelayanan publik dasar dan pengembangan perekonomian daerah dan (3) Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan kawasan strategis, diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah. Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, perlu ada perhatian khusus karena mempunyai

tantangan dan karakteristik yang berbeda dengan daerah tertinggal lainnya.

2) Kawasan Perbatasan

Agenda pembangunan kawasan perbatasan negara ditujukan untuk mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga sebagaimana amanat UU No. 17/2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

20. Isu Strategis Pengelolaan Risiko Bencana

- 1) Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di pusat dan daerah.
- 2) Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana.
- 3) Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta terbangunnya budaya keselamatan dalam pengurangan risiko bencana.
- 4) Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola penanggulangan bencana.

21. Isu Strategis Sinergi Pembangunan Perdesaan

- 1) Berkurangnya Desa Tertinggal (Desa Tertinggal, Desa-deso di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar) dari 36 persen pada tahun 2011 menjadi 24 persen pada tahun 2015;
- 2) Meningkatnya jumlah desa berkembang (desa berketahanan ekonomi) dari 53 persen pada tahun 2011 menjadi 61 persen pada tahun 2015.
- 3) Meningkatnya desa mandiri yaitu desa yang berketahanan pangan, ekonomi, dan mendukung perekonomian kawasan lain dari 11 persen pada tahun 2011 menjadi 15 persen pada tahun 2015.

22. Isu Strategis Perkuatan Ketahanan Pangan

- 1) Terwujudnya peningkatan produksi bahan pangan utama, yaitu: padi 73,4 juta; kedelai 0,9 juta ton; jagung 20,0 juta ton; gula 2,9 juta ton; daging sapi 476,8 ribu ton; dan daging unggas 1,1 juta ton.
- 2) Tercapainya peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

- 3) Tercapainya produksi hasil ikan (diluar rumput laut) ditargetkan sebesar 13,5 juta ton, yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 6,2 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 7,3 juta ton
- 4) Tercapainya produksi garam rakyat 2,5 juta ton
- 5) Tercapainya konsumsi ikan masyarakat sebesar 40,9 kg/kapita/tahun.
- 6) Tercapainya konsumsi kalori pada tahun 2015 minimal mencapai 2.011 kkal/kapita/hari
- 7) Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencapai 82,9 pada tahun 2015.
- 8) Tercapainya peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, irigasi air tanah, rawa dan tambak seluas 628,2 ribu ha.

23. Isu Strategis Peningkatan Ketahanan Energi

- 1) Produksi minyak bumi sebesar 912 ribu barel per hari.
- 2) Produksi gas bumi sebesar 1.248 ribu barel setara minyak per hari dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 50 persen.
- 3) Produksi batubara sebesar 421 juta ton dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 97 juta ton.
- 4) Bauran energi baru dan terbarukan sebesar 6 persen.
- 5) Rasio elektrifikasi sebesar 83,18 persen.

Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan

24. Isu Strategis Percepatan Pembangunan Kelautan

Mengoptimalkan Pemanfaatan Keekonomian dari Potensi Pulau-Pulau Kecil. Untuk kegiatan tersebut, sasaran tahun 2015 adalah:

- 1) Terwujudnya peningkatan kemandirian Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT) berpenduduk di 15 lokasi, termasuk memenuhi sarana dan prasarana serta fasilitas dasar dan ekonomi;
- 2) Terealisasinya pengembangan 3 gugus pulau sebagai sentra wisata bahari;
- 3) Terlaksananya revitalisasi kawasan pesisir menjadi pusat pengembangan ekonomi di 7 kawasan.
- 4) peningkatan infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang tertinggal dan terpencil.

Penyusunan Rencana Aksi Tata Kelola, Zonasi dan Pengamanan Wilayah Yuridiksi, termasuk Penetapan Batas Wilayah Laut Indonesia, dengan sasaran mencakup :

- 1) Tersusunnya Roadmap dan Rencana Aksi Nasional Pembangunan Kelautan;
- 2) Terwujudnya peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan laut dan kawasan konservasi laut, termasuk memperkuat dan mengembangkan Kerjasama Regional maupun Internasional dalam pengelolaan wilayah laut, seperti program CTI, SSME dan lainnya;
- 3) Terwujudnya penyelesaian tata batas dengan 9 negara (Malaysia, Singapura, Thailand, India, Australia, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste) melalui perundingan perbatasan dan penguatan diplomasi; dan
- 4) Tersusunnya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut, dengan sasaran mencakup:

- 1) Meningkatnya ketaatan pelaku usaha kelautan sebesar 45 persen dan ketaatan pelaku usaha perikanan dalam pemanfaatan sumber daya sebesar 85 persen;
- 2) meningkatnya cakupan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan menjadi 12,8 persen;
- 3) Meningkatnya penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan (illegal fishing sebanyak 80 persen).

Peningkatan Konektivitas Laut dan Industri Maritim, dengan sasaran mencakup :

- 1) Bertambahnya penyediaan 10 kapal laut perintis;
- 2) Pembangunan/rehabilitasi 26 pelabuhan laut perintis;
- 3) Tersedianya 80 lintas subsidi perintis angkutan laut; dan
- 4) Tersusunnya rancangan pengembangan industri maritim dalam pendukung pelaksanaan azas cabotage.

Peningkatan Pengamanan Pesisir dan Konservasi Perairan, dengan sasaran mencakup :

- 1) Meningkatnya kapasitas pengelolaan yang efektif di 10 kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil;
- 2) Bertambahnya luas kawasan konservasi seluas 500 ribu Ha atau menjadi 16,5 juta ha;
- 3) Terwujudnya pemulihan kawasan pesisir yang rusak di sebanyak 7 kawasan; dan
- 4) Membaiknya kerentanan masyarakat terhadap bencana di 22 kawasan.

Peningkatan Kapasitas SDM Kelautan, Inovasi Iptek Kelautan, Wawasan dan Budaya Bahari, dengan sasaran meliputi :

- 1) Terwujudnya Pengembangan pilot project pemanfaatan sumberdaya kelautan;
- 2) Tersedianya tenaga kerja terdidik kelautan dan perikanan sebanyak 6.250 orang dan yang terlatih sebanyak 15.000 orang; dan
- 3) Meningkatnya pemahaman dan wawasan bahari.

25. Isu Strategis Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup.

- 1) Terlaksananya pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan lindung, agro-ekosistem dan kawasan nonlindung/ produksi;
- 2) Terlaksananya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi;
- 3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 64,5;
- 4) Menguatnya upaya penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi) dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim.

2.3.2 Isu Penting dan Masalah Mendesak Lainnya di Provinsi Banten

Isu penting dan masalah mendesak lainnya di Provinsi Banten khususnya di kabupaten/kota bila dikelompokkan secara umum terdiri infrastruktur wilayah/kawasan dan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran, pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Adapun untuk rincian dari masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Pandeglang

- 1) Perlunya dukungan infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, air bersih dan listrik terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung dan Kawasan Pariwisata Pulau Umang;
- 2) Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pandeglang dan Pusat Kegiatan Wilayah Daerah (PKWD) Panimbang;
- 3) Penanganan banjir tahunan di Kecamatan Patia, Sobang, Pagelaran dan Panimbang;
- 4) Aspirasi masyarakat agar Pandeglang dijadikan sebagai kawasan pusat pendidikan;
- 5) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM melalui penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan dasar dan kesehatan yang layak
- 6) Penguatan Inovasi Daerah
- 7) Pengembangan kampung ternak domba di Desa Juhut dijadikan sebagai pusat penelitian ternak domba untuk percontohan dan direplikasi kedaerah lain;
- 8) Belum optimalnya pembangunan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Sumur dan Panimbang;
- 9) Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Carita dan Kawasan Wisata Alam serta Wisata Religi;
- 10) Perlunya dana kompensasi kelestarian lingkungan hulu-hilir untuk konservasi Kawasan Lindung AKARSARI (deretan Gunung Asepun-Gunung Karang-Gunung Pulosari) sebagai daerah resapan air;
- 11) Perlunya pelebaran dan peningkatan struktur jalan nasional di Banten Selatan yang menghubungkan akses Pandeglang-Lebak;
- 12) Perlunya pengembangan daerah penyangga Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya;
- 13) Percepatan revitalisasi Desa tertinggal lintas sektoral;
- 14) Revitalisasi pasar-pasar tradisional, Tempat Pelelangan Ikan dan balai benih ikan.

2. Kabupaten Lebak

- 1) Perlunya dukungan infrastruktur terhadap pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Malingping;
- 2) Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Rangkasbitung dan Pusat Kegiatan Wilayah Daerah (PKWD) Kawasan Perumahan Kekerabatan Maja;
- 3) Penanganan banjir tahunan di Kecamatan Wanasalam dan Cibuangan;
- 4) Aspirasi masyarakat agar Lebak dijadikan sebagai kawasan perkebunan dengan peremajaan tanaman karet, kelapa sawit, alpokat dan singkong;
- 5) Pengembangan kampung ternak kerbau di Desa Narimbang Mulya Kecamatan Rangkasbitung dijadikan sebagai pusat penelitian ternak kerbau untuk percontohan dan direplikasi kedaerah lain;
- 6) Belum optimalnya pembangunan Kawasan Minapolitan di Kawasan Pesisir Pantai Selatan Kecamatan Malingping dan Bayah;
- 7) Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Sawarna dan Bagedur, Kawasan Wisata Alam Arung Jeram Ciberang serta Wisata Religi;
- 8) Perlunya dana kompensasi kelestarian lingkungan hulu-hilir untuk konservasi Kawasan Lindung Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai daerah resapan air;
- 9) Perlunya pelebaran dan peningkatan struktur jalan nasional di Banten Selatan yang menghubungkan akses Depok- Bogor-Lebak- Pelabuhan Ratu Sukabumi;
- 10) Percepatan revitalisasi desa tertinggal lintas sektoral;
- 11) Percepatan pembangunan bendungan karian di Kecamatan Sajira dengan kapasitas 208.000.000 M3 untuk suplai air baku ke Jakarta, Cilegon, dan Tangerang serta sebagai pengendali banjir sungai ciujung dan konservasi sumber air;.
- 12) Percepatan pengembangan kawasan industri semen yang didukung potensi pertambangan di bagian selatan, di Kecamatan Bayah;
- 13) Penertiban dan pengembangan penambangan batubara, emas dan batu permata kalimaya;
- 14) Revitalisasi pasar-pasar tradisional, Tempat Pelelangan Ikan dan Balai Benih Ikan.

3. Kabupaten Serang

- 1) Percepatan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- 2) Rencana pembangunan Interchange Cikande dan Terminal Tipe A Cikande yang masih tertunda;
- 3) Rekonstruksi Rehabilitasi Pasca Bencana dan Penanganan banjir tahunan di Kecamatan Karenang, Kragilan dan Ciwandan;
- 4) Rencana pembangunan TPSA Bojong Menteng yang masih perlu dikaji ulang;
- 5) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Agropolitan Waringinkurung dan Kawasan Agropolitan Terpadu Baros;
- 6) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Minapolitan Pontang dan Tirtayasa;
- 7) Pengembangan Kawasan Agropolitan Baros;
- 8) Peningkatan Produksi dan Produktifitas Hasil Pertanian secara luas;
- 9) Taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih rendah;
- 10) Pengembangan potensi pariwisata terpadu Padarincang, Kawasan Pantai Wisata Anyer dan Pulau Tunda beserta Pulau Sanghiyang;
- 11) Rencana pembangunan Mesjid Terapung Banten di Anyer dan pengembangan/penataan kawasan sekitar pembangunan Mesjid Terapung;
- 12) Revitalisasi pasar-pasar tradisional.
- 13) Terkendalanya pembangunan Pelabuhan Internasional Bojonegara.

4. Kabupaten Tangerang

- 1) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
- 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penguatan pelaku UMKM dan pemberdayaan masyarakat
- 3) Sinergisasi penanggulangan kemiskinan dan perluasan penciptaan lapangan kerja
- 4) Rencana pengembangan reklamasi pantai kawasan strategis Tangerang Internasional City;

- 5) Revitalisasi Bandara Budiarto Curug sebagai pendukung Bandara Internasional Soekarno-Hatta;
- 6) Kondisi kemantapan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten termasuk penanganan *side drain* yang masih belum optimal;
- 7) Percepatan pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) II Serpong-Balaraja-Bandara Internasional Soekarno-Hatta;
- 8) Coastal Road sepanjang pantai utara untuk mendukung kawasan wisata pantai;
- 9) Penanganan banjir tahunan Sungai Cidurian, Sungai Cisadane, Sungai Cimanceuri dan Kali Sabi, serta abrasi pantai utara;
- 10) Percepatan pembangunan Terminal Tipe A Bitung;
- 11) Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Tangerang khususnya penanganan kemacetan dan drainase;
- 12) Penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang khususnya di kawasan pengembangan Bandara Internasional Soekarno Hatta;
- 13) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kronjo.

5. Kota Cilegon

- 1) Percepatan pembangunan ruas Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan Jalan Lingkar Utara (JLU) untuk mengatasi kemacetan kearah Kawasan Wisata Anyer, Kawasan Industri Bojonegara dan Pelabuhan Penyeberangan Merak;
- 2) Optimasi Pengembangan Kawasan Terminal Terpadu Merak dan percepatan pembangunan Terminal Angkutan Kota Seruni;
- 3) Penanganan banjir perkotaan dan di kawasan industri Ciwandan - Anyer;
- 4) Rencana pembangunan Bendungan Cidanau sebagai jaringan sumber daya air bagi kebutuhan air baku industri serta sebagai jaringan air baku untuk kebutuhan air minum di Wilayah Kota Cilegon dan sekitarnya;
- 5) Optimasi pengelolaan limbah industri Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

- 6) Mengefektifkan kerjasama pembangunan antar wilayah Serang-Cilegon (Seragon) dan pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kecamatan Cilegon;
- 7) Penataan kawasan permukiman, kawasan bisnis, kawasan wisata dan revitalisasi pasar-pasar tradisional.

6. Kota Tangerang

- 1) Pengembangan konektivitas transportasi perkotaan untuk memperlancar akses ke Bandara Internasional Soekarno Hatta, Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Serang;
- 2) Peningkatan dan pelebaran Jalan Provinsi (ruas jalan Hasyim Ashari, Husein Sastranegara, Cokroaminoto-Raden Fatah, Puri Kembangan-Daan Mogot) untuk mengatasi kemacetan;
- 3) Revitalisasi drainase perkotaan untuk menangani banjir tahunan akibat luapan Kali Cirarab, Sabi, Dadap, Mookervat, dan Pesanggrahan;
- 4) Perlunya pembangunan Jembatan Kedawung yang melintas Sungai Cisadane untuk menghubungkan antara Kota dan Kabupaten Tangerang;
- 5) Penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang khususnya di kawasan pengembangan Bandara Internasional Soekarno Hatta;
- 6) Revitalisasi pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kecamatan Cipondoh termasuk pengembangan Situ Cipondoh;
- 7) Mendorong pertumbuhan sektor unggulan yang berbasis sumberdaya lokal
- 8) Optimasi pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Rawa Kucing;
- 9) Penataan Kawasan Permukiman, Kawasan Bisnis dan Ruang Terbuka Hijau.

7. Kota Serang

- 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah guna peningkatan kualitas pelayanan publik.

- 2) Pemerataan akses pendidikan serta peningkatan kualitas pendidikan yang terjangkau sesuai dengan karakter agama dan budaya.
- 3) Peningkatan dan pengembangan akses kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 4) Penyediaan kebutuhan infrastruktur wilayah guna memenuhi fungsi kota yang makin kompleks dan berkembang sangat dinamis.
- 5) Pengembangan dan dukungan bagi usaha kecil, menengah dan koperasi.
- 6) Peningkatan dan penguatan ketahanan pangan yang berdaya saing.
- 7) Pengentasan kemiskinan serta perluasan peluang kerja, pengembangan kewirausahaan, perluasan lapangan kerja, aksesibilitas permodalan.
- 8) Pengembangan potensi pariwisata yang berbasis kepada budaya dan kearifan lokal.
- 9) Pengendalian pemanfaatan ruang dan isu pelestarian lingkungan hidup dalam pemanfaatan potensi sumberdaya alam.
- 10) Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan.

8. Kota Tangerang Selatan

- 1) Percepatan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- 2) Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan BSD-Serpong-Parung, Rencana Pembangunan Flyover Alam Sutera dan Flyover SMS;
- 3) Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan Serpong-Ciputat-Simpang Gaplek-Sawangan;
- 4) Penataan Geometri perempatan jalan untuk mengatasi kemacetan perkotaan dan penataan ulang U Turn;
- 5) Perbaikan drainase kota untuk menangani banjir tahunan dan interkoneksi drainase permukiman dengan drainase kota;
- 6) Peningkatan Akses & Kualitas Pelayanan Pendidikan Kesehatan
- 7) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah
- 8) Percepatan pembangunan TPSA Cipeucang dan optimasi armada persampahan;

- 9) Percepatan pembangunan Monorel Tangerang Selatan-Bandara Soekarno-Hatta;
- 10) Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Ciputat dan Ruang Terbuka Hijau;
- 11) Mengoptimalkan produksi tanaman hortikultura khususnya komoditas Anggrek dan Phylodendron;
- 12) Kaji ulang keberadaan Lapangan Terbang Pondok Cabe yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota dimana struktur bangunannya kearah vertikal;
- 13) Penataan kawasan permukiman, kawasan bisnis dan Revitalisasi Pasar-pasar Tradisional.

2.3.3 Isu Penting dan Masalah Mendesak Provinsi Banten Tahun 2015

Berdasarkan isu penting dan masalah mendasak dari tingkat nasional, dari lingkungan eksternal lainnya serta dari kabupaten/kota se-Provinsi Banten maka isu penting dan masalah mendasak di Provinsi Banten Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja

Jumlah pengangguran di Provinsi Banten tahun 2012 sebesar 519.210 orang. Masalah pengangguran sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Orang yang bekerja dibawah 35 jam per minggu masih masuk ke dalam kategori miskin. Berdasarkan data tahun 2013, jumlah tenaga kerja yang bekerja diatas 35 jam per minggu sebesar 3.720 ribu orang atau 80,22%, dibawah 35 jam per minggu sebesar 1.643,4 ribu orang atau 15,67% dan dibawah 15 jam per minggu sebesar 190,6 ribu orang atau 4,11%.

Sementara itu, komposisi tenaga kerja di Provinsi Banten didominasi oleh lulusan SD dan SMP, terlihat dari data BPS tahun 2013 (Per Agustus), Jumlah tenaga kerja berdasarkan pendidikan yaitu SD sebesar 1.807.308 orang atau 39%, SMP sebesar 866.062 orang atau 19%; SMA sebesar 871.494 orang atau 30,46%, SMK sebesar 565.964 orang atau 12%, Diploma I/II/III sebesar 143.216 atau 3%; dan Universitas sebesar 382.975 orang atau 8%. Hal ini berarti, penyerapan tenaga kerja masih rendah, dengan komposisi tenaga

kerja yang didominasi oleh lulusan SD dan SMP, maka hanya bisa terserap di sektor pertanian.

Sebaran jumlah pengangguran tahun 2012, yaitu Kabupaten Pandeglang 53.131 orang (10,23%), Kabupaten Lebak 50.687 orang (9,76%), Kabupaten Tangerang 152.235 orang (29,32%), Kabupaten Serang 86.715 orang (16,70%), Kota Tangerang 76.134 orang (14,66%), Kota Cilegon 20.360 orang (3,92%), Kota Serang 28.420 orang (5,47%), dan Kota Tangerang Selatan 51.528 orang (9,92%)

2. Kemiskinan

Berdasarkan data, tercatat bahwa indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,95 dan pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,021. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan Tahun 2012 yaitu sebesar 0,28 dan tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 0,293. Kondisi kemiskinan di Provinsi Banten juga dapat dilihat berdasarkan tingkat ketimpangan pendapatan atau Indeks Gini Tahun 2012 yaitu sebesar 0,38 dan meningkat tajam menjadi sebesar 0,41 pada tahun 2013. Kemiskinan sebagian besar pada sektor pertanian, dan sektor informal, terlihat dari data persentase penduduk miskin perkotaan di Provinsi Banten pada tahun 2012 sebesar 4,41% meningkat menjadi 5,27% pada tahun 2013, dan persentase penduduk miskin pedesaan sebesar 8,31% pada tahun 2012 berkurang menjadi sebesar 7,22% pada tahun 2013. Tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten juga sangat dipengaruhi oleh kenaikan inflasi.

3. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Empat komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. dan kestabilan pangan yaitu

kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang.

Ketahanan pangan merupakan isu yang tidak kalah pentingnya mengingat kebutuhan pangan akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kondisi pangan di Provinsi Banten diantaranya adalah produksi beras diserap oleh konsumsi masyarakat dan industri, pangan (beras) sebagai penyumbang inflasi terbesar, masih lemahnya logistik pangan masyarakat, alih fungsi lahan pertanian produktif meningkat, dan diversifikasi konsumsi pangan belum membudaya

4. Investasi dan Daya Saing Produk

Besarnya investasi dipengaruhi faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi yang berpengaruh di Provinsi Banten antara lain ketersediaan tenaga kerja, tingginya suku bunga, kondisi pasar, dan kondisi ekonomi makro daerah lainnya. Sedangkan faktor non ekonomi adalah kemudahan perijinan, kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban, serta kepastian hukum dalam berusaha. Optimisme pelaku usaha terkait investasi di Provinsi Banten semakin meningkat seiring meningkatnya potensi konsumsi domestik/nasional dan perkiraan pencapaian status investment grade bagi Indonesia pada periode yang akan datang. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI terbaru, tercatat Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Banten pada tahun 2011 jauh melebihi tahun 2010. Jumlah realisasi PMA pada tahun 2011 mencapai 418 proyek dengan nilai investasi sebesar USD 2,17 miliar, sementara itu tahun 2010 hanya sebanyak 280 proyek dengan nilai USD 1,54 miliar atau terdapat peningkatan sebanyak 138 proyek atau senilai USD 0,63 miliar. Di sisi lain, realisasi investasi dalam negeri di Banten mengalami penurunan dari sebanyak 76 proyek pada tahun 2010 (Rp 5,85 triliun) menjadi sebanyak 38 proyek (senilai Rp 4,10 triliun). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investor yang berminat di wilayah Banten cenderung berasal dari investor luar negeri. Ke depan, perbaikan proses kemudahan perijinan, kesiapan lahan industri dan infrastruktur serta promosi investasi tidak saja dilakukan untuk investor luar negeri tetapi juga perlu ditujukan bagi investor dalam

negeri. Struktur investasi Banten sampai saat ini dibentuk dari sektor swasta dan rumah tangga, yang terdiri dari sumbangan sektor K-UMKM sebesar 48,78%, sedangkan sektor Pemerintah terdiri dari APBN 8,01, APBD Provinsi Banten 3,34%, dan APBD kabupaten/kota 7,35%.

Perbankan di Provinsi Banten telah menunjukkan kinerja positif sebagai lembaga intermediasi investasi dan pembiayaan bahkan telah berfungsi sebagai development agent penarik investasi dimana selisih jumlah penyaluran pembiayaan dengan dana pihak ketiga (simpanan) pada tahun 2011 sebesar Rp. 62,22 trilyun. Dari penyaluran jumlah kredit berdasarkan lokasi proyek sebesar Rp. 112,22 trilyun termasuk didalamnya penyaluran langsung oleh bank pelapor sebesar Rp. 51,951 trilyun.

Pertumbuhan penyaluran pembiayaan kredit perbankan pada tahun 2011 menurut sektor ekonomi berdasarkan lokasi proyek terbesar pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang tumbuh sebesar 200% diikuti berturut-turut oleh sektor konstruksi sebesar 151%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 72% dan sektor pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 56%. Besaran pertumbuhan pembiayaan di sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor tersebut memberikan gambaran daya tarik investasi yang tinggi. Sementara pertumbuhan di sektor konstruksi dan pengangkutan sebagai sektor pendukung aktifitas ekonomi memiliki gambaran pertumbuhan investasi pada sektor lain yang bergerak di sektor produksi. Hal ini ditandai pula dengan data besaran pertumbuhan pembiayaan kredit investasi sebesar 51% dan kredit modal kerja sebesar 32,50%. Pembiayaan kredit pada UKM berdasarkan lokasi proyek pada tahun 2011 sebesar Rp. 16,725 trilyun termasuk KUR sebesar Rp. 1,317 trilyun. Penyaluran terbesar kredit UKM pada sektor perdagangan sebesar Rp. 6,67 trilyun di sektor industri pengolahan sebesar Rp. 4,096 trilyun.

5. Infrastruktur Wilayah dan Kawasan

Kesenjangan pembangunan antar daerah, dan antar kawasan sampai saat ini masih sangat besar. Hal ini disebabkan pendekatan pembangunan daerah lebih bersifat sektoral, tidak terpadu antara

satu sektor dengan sektor lainnya. Pendekatan pengembangan wilayah merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mempercepat keserasian pembangunan antar daerah/wilayah. Oleh karena itu perlu dikembangkan program kewilayahan untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan dan berkelanjutan pembangunan antar wilayah/antar kawasan sesuai dengan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efektif, tertib dan aman.

Pengembangan dan pemerataan pertumbuhan wilayah agar diarahkan pada upaya:

- 1) Mendorong dan mengimplementasikan kerjasama pembangunan antar daerah/wilayah secara fungsional sebagai instrumen penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah.
- 2) Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan mengutamakan pemanfaatan potensi keunggulan lokal, peningkatan investasi dan partisipasi swasta, pemberdayaan lembaga perekonomian masyarakat serta mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perhubungan.
- 3) Mendorong percepatan pembangunan wilayah tertinggal dengan menggunakan data dan informasi yang valid dan lengkap yang mencerminkan kondisi terakhir ketertinggalan di setiap kecamatan dan sektor tertentu.
- 4) Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
- 5) Pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan

Kawasan strategis Provinsi Banten yang akan diprioritaskan sesuai dengan RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 pada tahun 2014 antara lain Kawasan Tanjung Lesung-Panimbang di Kabupaten Pandeglang, Kawasan Bayah dan sekitarnya di Kabupaten Lebak, Kawasan Malingping dan sekitarnya di Kabupaten Lebak, Kawasan Cibaliung dan sekitarnya di Kabupaten Pandeglang, Kawasan Balaraja di Kabupaten Tangerang, Kawasan Teluknaga di Kabupaten

Tangerang, KP3B di Kota Serang, Kawasan Sport City di Kota Serang, KSE Bojonegara di Kabupaten Serang, KSE Krakatau di Kota Cilegon, Kawasan Kota Kekerabatan Maja di Kabupaten Lebak, Kawasan Kaki Jembatan Selat Sunda, Kawasan Banten Water Front City di Kota Serang dan Kawasan pusat-pusat pertumbuhan lainnya.

Pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan sangat penting guna menunjang peningkatan perekonomian wilayah dan kawasan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi infrastruktur di Provinsi Banten khususnya kondisi jalan provinsi dan nasional saat ini sebagian besar dalam kondisi rusak sehingga pada tahun 2015 tetap perlu mendapat perhatian khusus.

Penanganan Kondisi Jalan dilakukan melalui pemeliharaan dan peningkatan jalan, peningkatan fungsi jembatan timbang, peningkatan pengendalian dan pengawasan dan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan transportasi.

Fokus Penanganan Infrastruktur 2015 diarahkan pada pembangunan jalan menunjang pariwisata, kawasan pusat pertumbuhan, penanganan kemacetan, kawasan pertanian dan pusat pemerintahan.

Penanganan infrastruktur jalan mendukung Pariwisata, antara lain:

- 1) Melalui APBD yaitu peningkatan jalan ruas Sumur-Cibaliung, Cigelung Bayah, Tanjung lesung-Sumur, Kronjo-Mauk-Tanjungkait, Palima-Cinangka-Anyer, dll;
- 2) Melalui APBN yaitu peningkatan jalan ruas Labuan-Cibaliung Muarabinuangeun Bayah, Cilegon-Bojonegara dan Cilegon-Pasauran, dll;
- 3) Peningkatan jalan Saketi-Malingping.

Penanganan infrastruktur jalan mendukung Kawasan Pusat Pemerintahan antara lain:

- 1) Melalui APBD yaitu peningkatan Jalan ruas Serang-Palima-Pakupatan, Bayangkara – Cilaku – Pakupatan - Palima, Serang - Cilaku (pertigaan Petir-KP3B), Lingkar Selatan (Tb Suwandi)-Sayabulu-Serang-Palima;

- 2) Melalui APBN yaitu Peningkatan jalan ruas Tol Serang Timur-Sudirman, Serang-Cilegon (Tol Barat Serang), Serang-Pandeglang.

Penanganan infratraktur jalan mengurangi kemacetan Perkotaan, antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas jalan seperti: ruas Hasyim Ashari, Ciputat-Pamulang, Abdul Hadi-Fatah Hasan;
- 2) Penataan Persimpangan seperti: Sp. Brimob, Wr. Pojok, Sp. Kependean, Sp. Cirendeu dll.

Penanganan infratraktur dasar mendukung Kawasan Pusat Pertumbuhan:

- 1) Peningkatan jalan akses pusat pertumbuhan;
- 2) Peningkatan dan penyediaan Perumahan dan Permukiman;
- 3) Peningkatan dan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan;
- 4) Pembangunan Listrik Perdesaan.

Sedangkan penanganan infrastruktur sumber daya air guna mengatasi banjir dan kekeringan meliputi:

- 1) Pembangunan Bendungan Sindang Heula dan Karian;
- 2) Penataan dan revitalisasi situ/waduk;
- 3) Normalisasi tanggul dan sungai;
- 4) Konservasi dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS).

6. Pendidikan Untuk Semua dan Berbasis Kompetensi Pasar Kerja

Untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan di Provinsi Banten dilakukan dengan 3 (tiga) Pilar yang terdiri dari aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Hal ini telah sesuai dengan target pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) dibidang pendidikan dan kesehatan.

Aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas meliputi penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten. Kedua isu tersebut akan berimplikasi pada tantangan penyediaan sarana dan

prasarana pendidikan yang memadai, serta pembebasan biaya pendidikan khususnya pendidikan dasar. Dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, strateginya adalah melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah serta peningkatan kualifikasi guru. Pada aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, yang menjadi fokusnya adalah pada upaya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM), standarisasi pelayanan pendidikan, serta pengelolaan data dan informasi pendidikan.

Permasalahan dari penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Provinsi Banten adalah terbatasnya akses pendidikan menengah karena kurangnya ruang kelas baru dan unit sekolah baru. Permasalahan pokoknya adalah keterbatasan lahan untuk menambah ruang kelas baru dan unit sekolah baru yang pengadaannya menjadi kewenangan kabupaten/kota. Kondisi ini menyebabkan tingginya angka putus sekolah dijenjang pendidikan menengah. Sebanyak 60% tenaga kerja di Banten adalah lulusan SD dan SMP sebagian besar tidak memiliki keterampilan khusus dan banyak terserap disektor pertanian.

Peluang kedepan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan melalui kebijakan Pemerintah daerah menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20% serta dukungan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

7. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Dibidang kesehatan berbagai kasus penyakit di Provinsi Banten masih menjadi permasalahan disebabkan oleh sanitasi lingkungan yang masih buruk, cakupan layanan air bersih yang kurang dan perilaku masyarakat yang belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), disamping itu juga cakupan layanan kesehatan masyarakat yang masih kurang. Masih terdapat penyakit TB paru, penyakit ISPA, HIV/AIDS, demam berdarah dan gizi buruk serta penyakit kaki gajah (filariasis). Penyebaran penyakit HIV/AIDS baik melalui aktivitas seksual dan penggunaan jarum suntik merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius oleh pelaksana pelayanan kesehatan disemua tingkat pemerintahan.

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan di puskesmas, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanannya perlu ditingkatkan, demikian pula adanya peningkatan jumlah puskesmas. Selain itu masalah penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata disetiap daerah menyebabkan terlambatnya penanganan kesehatan di perdesaan. Permasalahan dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Banten diantaranya adalah masih tingginya sebaran penyakit menular di beberapa daerah, angka penyakit degeneratif yang masih tinggi, gangguan kejiwaan meningkat, sarana prasarana dan tenaga layanan kesehatan yang belum memadai, tingginya penyalahgunaan NAPZA. Sedangkan fenomena yang terjadi dalam aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat adalah sebaran penyakit berkorelasi dengan kualitas lingkungan, menjamurnya praktik pengobatan alternatif, penanganan kesehatan bersifat parsial serta pembagian peran antara pemerintah dan swasta belum terstruktur.

Adapun tantangan aktual ke depan yang dihadapi adalah pelayanan kesehatan global, membangun pelayanan kesehatan berkualitas bersama swasta, dan mewujudkan masyarakat yang mandiri kesehatan. Selanjutnya ancaman yang dihadapi di masa mendatang diperkirakan adalah adanya perubahan iklim (Climate Change) sehingga terjadi pemanasan global yang menimbulkan berbagai penyakit, terjadinya mobilisasi penduduk yang tinggi sehingga mutasi penyakit sangat mudah dan kerusakan lingkungan akibat perilaku masyarakat sehingga membuat lingkungan menjadi tidak sehat.

Namun demikian terdapat peluang untuk memajukan pembangunan kesehatan, yaitu: peningkatan iptek di bidang kesehatan, memiliki perguruan tinggi yang dapat mencetak sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas, dan komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.

8. Kelestarian Lingkungan Hidup, Mitigasi dan Adaptasi Bencana

Kondisi kelestarian alam di Provinsi Banten relatif masih terjaga kelestariannya khususnya di kawasan lindung seperti kawasan strategis Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Cagar Alam Rawa Danau, Cagar Alam Gunung Tukung Gede, kawasan

Gunung AKARSARI (Gunung Aseupan, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari).

Namun demikian kerusakan habitat ekosistem relatif sering terjadi di wilayah pesisir dan laut, khususnya di wilayah pantai utara dan barat. Berbagai jenis kerusakan tersebut antara lain disebabkan oleh peristiwa alam abrasi dan akresi di Kabupaten Tangerang dan Serang. Sedangkan kerusakan yang dipengaruhi oleh aktifitas manusia antara lain sedimentasi daerah pesisir (pantai) di Kabupaten Tangerang dan Serang, kerusakan dan konversi hutan mangrove di pantai utara khususnya akibat pengembangan lahan tambak. Hal ini perlu pengendalian pencemaran lingkungan yang lebih ketat pada kawasan pesisir dan pantai untuk budidaya perikanan dan industri yang lebih ramah lingkungan.

Walaupun sudah dilakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan namun masih terdapat berbagai aktifitas ekonomi yang belum ramah lingkungan, seperti adanya kawasan pertambangan di areal hutan lindung dan maraknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat merusak lingkungan. Berkembangnya kawasan industri di wilayah utara Provinsi Banten memberikan implikasi langsung terhadap tingginya kerawanan pencemaran lingkungan. Sejumlah kasus pencemaran lingkungan yang terkait dengan keberadaan dan aktifitas industri diantaranya seperti: tumpahan HCL, tumpahan xylene dari tangki terbakar, terbakarnya limbah B3, serta tumpahan kaustik soda, dan lain-lain. Disamping itu, indikasi tingkat pencemaran tinggi pada sungai-sungai sebagai akibat aktifitas industri dan permukiman, seperti Sungai Cimoyan, Sungai Ciujung, Kaliangke, Cirarap, dan Cibanten juga perlu ditanggulangi.

Kerawanan kasus pencemaran udara pada kawasan-kawasan industri, seperti pencemaran debu dan gas yang melebihi baku mutu (kategori berat) di Cilegon, serta tingkat kebisingan yang melebihi baku mutu (kategori berat) di Tangerang, Serang, Cilegon. Sementara itu pencemaran udara dan air juga merebak pada kawasan permukiman sebagaimana kasus Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPSA) Desa Bagendung Kota Cilegon.

Tingginya tingkat curah hujan, terutama pada bulan Januari hingga Maret menyebabkan beberapa daerah di Provinsi Banten rawan terkena bahaya banjir. Terutama pada daerah yang lebih rendah dari pasang surut air laut, daerah dataran rendah yang tidak ada vegetasi penutupnya, daerah alih fungsi lahan, dan daerah perluasan perkotaan karena berkurangnya daerah resapan air dan sedimen. Selain itu, permukiman kumuh yang terdapat di bantaran sungai dan pembuangan sampah di alur sungai menyebabkan terhambatnya aliran sungai sehingga menyebabkan banjir.

Daerah rawan bencana banjir sering terjadi pada wilayah Pandeglang (Kecamatan Patia, Sobang, Panimbang, Pagelaran), Lebak (Kecamatan Wanasalam), Cilegon, Serang dan Tangerang dikarenakan luapan aliran sungai yang melintasi daerah tersebut seperti sungai Cibama, Cilemer, Ciliman, Cibuangan, Cijalupang, Ciujung, Cidurian, Cisadane, Cirarap, Mookervart dan Kali Sabi.

Banten juga termasuk kedalam daerah rawan bencana gempa bumi, seperti gempa vulkanik akibat keberadaan anak Gunung Krakatau di Selat Sunda, juga ada potensi gempa tektonik yang diakibatkan gesekan pertemuan Lempeng Benua di dasar laut. Selain itu Banten sebagai bagian dari wilayah perairan Indonesia merupakan tempat bertemunya tiga Lempeng Benua, yaitu Lempeng Hindia atau Indo-Australia di sebelah selatan, Lempeng Eurasia di Utara, dan Lempeng Pasifik di Timur. Kesemua hal di atas harus menjadi perhatian semua pihak agar siap dalam menghadapi kondisi rawan bencana tersebut.

9. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Sesuai dengan cita-cita pembentukan Provinsi Banten yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, agar menjadi Provinsi yang mandiri berdasarkan azas otonomi daerah dengan tujuan mendekatkan jangkauan pelayanan pemerintah kepada publik/masyarakat di wilayahnya. Sampai saat ini optimalisasi fungsi pemerintahan masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya melalui pelaksanaan program peningkatan kapasitas lembaga pemerintah daerah sesuai dengan sasaran dan target pada agenda pemerintahan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2012-2017. Dalam pelaksanaannya diperlukan rencana dan persiapan secara mantap,

terukur dan bersinergi antara bidang/sektor terkait yang melibatkan seluruh unsur/komponen masyarakat diseluruh wilayah Provinsi Banten, yang didukung perencanaan penganggaran secara detail dan teliti disesuaikan dengan potensi keuangan daerah tahun 2015.

Dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, hal-hal yang masih menjadi fokus permasalahan pembangunan bidang pemerintahan yaitu:

- 1) Masih rendahnya pemahaman penyelenggara pemerintahan tentang keseimbangan pola hubungan antar lembaga terutama antara lembaga pemerintah (eksekutif) dan lembaga perwakilan (legislatif) dalam penentuan perencanaan dan kebijakan penganggaran pembangunan daerah;
- 2) Masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan;
- 3) Masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai;
- 4) Penegakan hukum termasuk di dalamnya proses implementasi atas penegakan hukum berdasarkan pada prinsip keadilan;
- 5) Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang tetap menjadi perhatian dalam kehidupan masyarakat;
- 6) Pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah yang belum optimal.